STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Serjana Hukum (SH) Dalam Jurusah Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah

Oleh:

MEGA SILFIA

Nim: 1315.011

FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

2019 M/1441 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Mega Silfia
NIM	: 1315.011
Temapat/Tanggal Lahir	: Payakumbuh, 17 Januari 1996
Program Studi	: Hukum Tatanegara (Siyasah)
Judul Skripsi	: Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kota Payakumbuh

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya penulis, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 04 November 2019

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL 6C4DDAFF897158080 6000 ENAM RIBU RUPIAH

MEGA SILFIA
NIM. 1315.011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Stategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kota Payakumbuh"**, yang disusun oleh oleh **Mega Silfia** dengan **NIM 1315.011**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan siap untuk dimunaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Bukittinggi, 25 Oktober 2019

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum	**Adlan Sanur Th, M.Ag**
NIP. 197405251998031006	**NIP. 197603222005011003**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul: **"Stategi Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kota Payakumbuh"**, yang disusun oleh **MEGA SILFIA, NIM: 1315.011,** telah diuji dalam Sidang *Munaqasah* Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 18 November 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tatanegara (HTN).

Bukittinggi, 22 November 2019

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Afifi Fauzi Abbas, MA	**H. Fahmil Samiran, Lc, MA**
NIP. 195609061982031004	**NIP. 19760606 200604 1 004**

Anggota,

Dr. H. Afifi Fauzi Abbas, MA	**H. Fahmil Samiran, Lc, MA**
NIP. 195609061982031004	**NIP. 19760606 200604 1 004**
Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum	**Adlan Sanur Th, M.Ag**
NIP. 197405251998031006	**NIP. 19760322200005011003**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 196804091994031008

ABSTRAK

Skripsi ini di tulis oleh **Mega Silfia, NIM. 1315.011** yang berjudul **"STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH".** Maksud penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara maupun rencana yang di susun oleh DPD PKS Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019 terutama dalam bentuk-bentuk dan hambatan-hambatan strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemilihan umum Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh perolehan suara PKS di Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif pada tahun 2009 dengan perolehan suara 1. 275 suara dan tahun 2014 sebanyak 8.446 suara. Di lihat dari tahun 2009-2014 mengalami peningkatan perolehan suara yang sangat besar dari tahun pemilihan umum sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemilihan umum Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan *(Field Research)* menggunakan teknis analisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara mengenai data-data yang diteliti, kemudian dilakukan penganalisaan terhadap fenomena suatu keadaan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara yang penulis amati di kantor DPD PKS Kota Payakumbuh yang dalam hal ini di fokuskan pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa bentuk-bentuk strategi PKS di Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019, *Pertama* memilih calon Legislatif potensial dari berbagai segmen masyarakat. *Kedua,* Memberikan pendidikan politik dengan cara adanya program PKS. *Ketiga,* adanya metode kampanye Flas Mob (aksi bersama turun kejalan-jalan raya, dan pusat keramaian). *Keempat,* Direct Selling ini merupakan ciri khas turun kemasyarakat atau bersosialisasi langsung dengan masyarakat tersebut. *Kelima,* kominikasi dan pendekatan tokoh-tokoh masyarakat. Adapun hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penerapan strategi politik pada Pemilihan Umum Legislatif 2019, *Pertama,* kemampuan finansial partai yang minim. *Kedua,* jumlah kader yang terbatas menyebabkan susahnya untuk menjalankan berbagai strategi-strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). *Ketiga,* ancaman "serangan fajar" yang sering merubah pilihan masyarakat menengah kebawah. *Keempat,* adanya perbedaan pemahaman aturan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan partai politik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kota Payakumbuh".**

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada *Habibullah* junjungan umat Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah kebenaran melalui Al-qur'an dan sunnah. Beliau merupakan suri tauladan yang paling baik serta pelita penerang jalan di celah-celah kegelapan dalam kehidupan umat manusia hingga akhir zaman.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Ayahanda Jasri. N dan Ibunda Ismawati, atas semua do'a dan dukungan yang diberikan serta curahan kasih sayang yang tiada henti melalui pengorbanan yang sangat besar, sehingga membuat penulis sangat bersemangat dalam menyelesaikan studi dan meraih cita-cita. Semoga Allah SWT. selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada keduanya. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara kandung penulis yaitu Rio Saputra, dan Riki Gusrianto, dan khususnya kepada keluarga besar penulis yang selalu mendo'akan penulis agar dapat menyelesaikan

pendidikan ini secepatnya yang memiliki peran cukup besar dalam hidup penulis. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum, selaku Rektor IAIN Bukittinggi beserta bapak wakil rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak Dr. Ismail Novel, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta wakil Dekan I, wakil Dekan II dan wakil Dekan III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
3. Bapak Dr.Helfi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Bukittinggi.
4. Bapak Fajrul Wadi, S.Ag. M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik dan dosen Pembimbing I dan Bapak Adlan Sanur Th, M.Ag Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat penting dan bermanfaat bagi penulis guna penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, dan pelayanan terbaik selama masa perkuliahan.
6. Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan serta karyawan dan karyawati perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan dan memfasilitasi penulis dalam mencari literatur dan berbagai kajian ilmu terkait penelitian yang dilakukan.
7. Kepada Bapak Ketua, Wakil ketua dan pengurus DPD PKS Kota Payakumbuh yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor

DPD PKS Kota Payakumbuh.

8. Kepada seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat penulis yang telah berkenan membantu penulis serta selalu memberikan dorongan moril kepada penulis agar bisa menyelesaikan pendidikan di IAIN Bukittinggi.

Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis, menyemangati, serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal ibadah mereka diterima dan dilipat gandakan Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bukittinggi, 25 Oktober 2019

Penulis,

MEGA SILFIA
NIM. 1315.011

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... i

PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR.....iv

DAFTAR ISI.....vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Masalah dan Rumusan..... 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

D. Penjelasan Judul.....10

E. Metode Penelitian.....11

F. Sistematika Penulisan.....13

BAB II PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA DAN PEMILIHAN UMUM

A. Gambaran Umum Tentang Partai Politik di Indonesia 14

B. Partai Politik Islam di Indonesia 23

C. Konsep Strategi Politik 36

D. Pemilihan Umum di Indonesia.....39

BAB III STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH

A. Profil Partai Keadilan Sejahtera 49
B. Capaian Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera Di Kota Payakumbuh Dalam Pemilihan Umum Legislatif 58
C. Strategi Yang Digunakan PKS Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kota Payakumbuh 60
D. Analisis Penulis Terhadap Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh..... 74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 79
B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem demokrasi di Indonesia lahir setelah runtuhnya orde baru di bawah kekuasaan Soekarno yang sangat otoriter dari menutup akses masyarakat untuk demokrasi secara langsung. Sekarang Indonesia telah diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan tanpa ada paksaan seperti adanya partai politik baik itu politik Nasionalis maupun partai politik Islam, melalui partai politik tersebut masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui partai politik Islam yang menurut masyarakat mereka akan amanah dalam membela hak mereka. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An- Nisa' ayat: 58, yaitu:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرًا (ا لنسا ء/۴: ۵۸)

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat". (Q.S An- Nisa': 58*)*

Dari ayat di atas dapat di jelaskan bahwa pemimpin itu harus amanah dalam segala hal, baik itu terhadap dirinya, maupun terhadap keluarga, maupun orang yang di pimpinnya begitu juga terhadap partai politik. Dan seorang pemimpin haruslah adil dalam menetapkan putusan. Banyak yang beranggapan bahwa setiap negara harus mempunyai partai politik, banyak yang beranggapan

pula bahwa negara yang memiliki partai politik adalah negara maju.[1]

Bahkan beberapa literatur dijelaskan bahwa partai politik adalah bagian dari pembangunan politik yang demokratik. Pada kenyataannya negara yang tidak memiliki partai politik, seperti Brunai Darussalam, Arab Saudi, Kuwait, dan lain sebagainya, mau tidak mau harus membangun partai politik yang demokratik. Namun pada masa sekarang ini, negara-negara di dunia hampir seluruhnya menggunakan demokrasi tidak langsung maupun demokrasi perwakilan.

Politik adalah suatu kehendak seseorang atau lebih yang dicapai melalui kesadaran dalam tindakan atau rangkaian tindakan agar dapat mencapai kehendak yang ditujukan dengan motif kekuasaan atau finansial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan dan peranan yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik biasa disebut sebagai pilar demokrasi, karena mereka memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negarannya.[2]

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011tentang Partai Politik pasal 1 ayat (1)

> *Organisasi* yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia bedasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

[1]Inu Kencana Syafeei, *Pengantar Ilmu Politik,* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009), Cet.1, hal. 1316

[2]Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakata: Graha Ilmu, 2013), hal. 10

Namun antara masyarakat, politik dan partai politik tidak dapat dipisahkan karena mereka saling berhubungan. Partai politik merupakan salah satu institusi politik yang merupakan inti dari pelaksanaan demokrasi. Sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran partai politik yang ingin menjadi peserta Pemilihan umum tahun 2019, total ada 27 (dua puluh tujuh) partai politik yang mendaftar. Komisi pemilihan umum lalu memverifikasi secara administratif dan faktual hingga jatuh putusan pada 17 Februari 2018 bahwa hanya 20 (dua puluh) partai politik nasional yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan umum tahun 2019.

Adapun partai politik peserta Pemilihan umum tahun 2019 sesuai urutannya adalah sebagai berikut:

1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4) Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5) Partai NasDem
6) Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
7) Partai Berkarya
8) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
10) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

12) Partai Amanah Nasional (PAN)

13) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

14) Partai Demokrat

15) Partai Aceh

16) Partai Sira (Aceh)

17) Partai Daerah Aceh

18) Partai Nanggroe Aceh

19) Partai Bulan Bintang (PBB)

20) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Partai nasional tersebut adalah 11 (sebelas) partai lama peserta pemilihan umum dan 4 (empat) partai baru, yakni PSI, Perindo, Berkarya, dan Partai Garuda. Sedangkan empat partai lokal adalah Partai Aceh dengan nomor urut 15, Partai Sira (Aceh) di nomor urut 16, Partai Daerah Aceh nomor urut 17, dan partai Nanggroe Aceh di nomor urut 18, Sedangkan di Kota Payakumbuh yang ikut calon Legislatif 15 partai, dan satu partai yang tidak ikut calon Legislatif PKPI.[3]

Adapun mengatur tentang sistem politik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1) Tentang Partai Politik, begitu banyak partai politik salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Keadilan secara resmi didirikan pada 20 Juli 1998.[4]

Pemilihan umum pertama di era Reformasi yang diadakan pada tanggal 7 Juli 1999. Partai Keadilan sendiri terbukti gagal memperoleh batas minimal

[3] www.kota. payakumbuh.kpu.go.id/ hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 jam 11:58 WIB

[4] Kompas, *Partai- Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*, (Jakarta: Kompas, 2004), hal. 301

suara (*electoral treshold*) sebagai syarat mengikuti Pemilihan umum selanjutnya. Yang mana menjadi salah satu penyebabnya anjloknya suara di Pemilihan umum yaitu ketertutupan Partai Keadilan. Partai ini hanya meraih 1,36 persen dari total suara pemilihatau sekitar 1,4 juta pemilih. Partai Keadilan (PK) sendiri berada di urutan ketujuh. Akhirnya setelah melalui pertentangan pada 1 September 1999, pembagian kursi disepakati. Partai Keadilan (PK) mendapat tujuh kursi di parlemen.

Gagal mencapai *electoral threshold* maka Partai Keadilan (PK) tidak dapat mengikuti pemilihan umum tahun 2004 kecuali berganti nama dan lambang. Maka Partai Keadilan (PK) harus beralin nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 20 April 2002. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat kabupatan dan kota).[5]

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah mendaftarkan secara resmi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 27 Mai 2003, akhirnya dapat disahkan sebagai partai politik yang berbadan hukum pada 17 Juli 2003.[6] Sehari kemudian, Partai Keadilan (PK) bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penggabungan ini sekaligus menandai hak milik Partai Keadilan (PK) menjadi milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka Partai Keadilan (PK) resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera

[5]Tim Divora dan Yugha E, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu,* (Jakarta: Erlangga, 2014). Hal. 69

[6]Kompas, *Partai- Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*, ... , hal. 304

(PKS).

Pada pemilihan umum tahun 2004, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraih pencapaian yang di signifikasi. Partai ini meraih 7,34 persen suara atau sekitar 45 dari total 550 kursi di perlemen. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) duduk di urutan keenam dan lolos *electoral threshold.* Partai-partai besar pun mulai mendekati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk berkoalisi.

Pada pemilihan umum tahun 2009 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil menaikkan perolehan suara dengan total 7,88 persen suara pemilih atau urutan keempat. Partai Keadilan Sejahtera pun mendapatkan 57 kursi di perlemen. Meski gagal mencapai target 20 persen suara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menjelma menjadi partai Islam besar. Suaranya meungguli partai-partai Islam lainnya seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembanginan (PPP).

Memasuki politik tahun 2014, dengan memantapkan jargon: Cinta, kerja dan harmoni, saatnya para calon Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk tampil beda, lebih gaul terbuka untuk menerima semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama dan lain-lain, ujur mantan sekretraris. Jenderal partai dakwa itu.[7]

Jadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sendiri adalah suatu *Jam'iyyah* yaitu sekelompok orang yang beraneka ragam dari lintas suku, bahasa warna kulit namun, mempunyai ideologi yang satu terutama di bidang politik. Kader-kader Partai Keadilan memang dikenal sangat militan. Salah satu contoh menarik dari

[7]Tim Divora dan Yugha E, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu,...*, hal. 70

sekian banyak partai politik hanya kader Partai Keadilan Sejahtera mempunyai keistimewaan yang menjadikannya yang bernuansa Islam (dakwa). Tidak seperti keorganisasian keagamaan lainnya yang memisahkan antara elemen dakwa dan elemen lainnya khususnya politik.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kerap menunjukkan identitas dari mereka dengan menggunakan atribut-atribut partai meski tidak dalam musim pemilihan umum. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak hanya hadir dalam masalah demokrasi, pemilihan umum, atau pun waktu pemilihan calon Legislatif tapi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga hadir dalam kegiatan masyarakat dalam terjadinya bencana alam (tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain) Partai Keadilan Sejahtera juga ikut serta turun ke masyarakat.

Pada pemilihan umum tahun 2004, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kota Payakumbuh meraih pencapaian sebanyak 7. 273 suara di DPR Republik Indonesia, 8.1963 suara di DPRD Provunsi dan 7.345 suara di DPRD Kota . Pada tahun 2009 Partai Keadilan Sejahtera di kota Payakumbuh turun perolehan suara menjadi 1. 048 suara di DPR Republik Indonesia, di DPRD Provunsi 1. 275 suara dan 1.195 suara di DPRD Kota. Pada tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil menaikkan perolehan suara sebanyak 9.867 suara di DPR Republik Indonesia, di DPRD Provunsi 8.446 suara dan 7.457 suara di DPRD Kota. Sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Daftar Jumlah Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada

Pemilihan Umum Legislatif Tingkat Kota Payakumbuh[8]

No	Tahun	Perolehan Suara			
		DPRD Kota			
		Pyk. Barat	Pyk. Utara dan Lamposi Tigo Nagori	Pyk.Timur dan Pyk. Selatan	Jumlah
1.	2004	3.350	2.798	1.197	7. 345
2.	2009	391	515	289	1.195
3.	2014	2.205	2.937	2.315	7.457
4.	2019	5.929	4.534	3.370	13.833

Pemilihan umum tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah menetapkan target bisa meraih 30 persen suara pemilih dalam pemilihan umum tahun 2019. Selain akan memperluas segmen suara pada kelompok nasionalis dan sekuler, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga akan mengandalkan para kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan para pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) khususnya yang ada di Kota Payakumbuh untuk mensukseskan target yang direncanakan. Jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpeluang mencalonkan kadernya pada pemilihan presiden 2019 dalam artian tercapai 30 persen itu, pihak membuka peluang berkoalisi dengan pihak manapun. Partai yang berkoalisi itu harus sejalan visi dam misinya. Untuk menentukan koalisi akan dilakukan dengan partai mana, tentunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan membahas dan memutuskan dalam majelis syura.[9]

[8]Data dari kantor KPU Kota Payakumbuh, Hari Jum'at, Tanggal 26 Mai 2019 Jam 11:07 WIB

[9]Data kantor DPD PKS Kota Payakumbuh, Hari Kamis, Tanggal, 31 Desember 2019 Jam 13:30 WIB

Terkait atas kekalahan Partai Keadilan Sejahtera di Kota Payakumbuh pada tahun 2014. Maka pada tahun ini Partai Keadilan Sejahtera harus menyusun dengan baik strategi-strategi yang baru supaya dapat menduduki kursi Legislatif.

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: ***Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kota Payakumbuh.***

B. Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

   Sehubung dengan luasnya bahasan yang dikaji, maka penelitian ini dirumuskan beberapa batasan masalah diantaranya:

   a. Bentuk-bentuk strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019 (perspektif pimpinan daerah DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh).
   b. Hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menerapkan strategi politik pada pemilihan umum Legislatif 2019 Kota Payakumbuh (perspektif pimpinan daerah DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh).

2. Rumusan Masalah

   Berdasarkan yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah bagaimana

strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemilihan umum Legislatif 2019 Kota Payakumbuh (perspektif pimpinan daerah DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh).

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019.
   b. Untuk menjelaskan bagaimana hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menerapkan strategi politik pada pemilihan umum Legislatif 2019 Kota Payakumbuh.
2. Kegunaan Penelitian
   a. Untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan dan mencapai gelar Serjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah.
   b. Mengetahui bentuk-bentuk strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh untuk memenangkan pemilihan umum Legislatif 2019.
   c. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wacana bagi penyusun dan pembaca secara pribadi.
   d. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi manfaat siapa saja yang membutuhkan informasi lebih lanjut dan lebih mudah terutama bagi perkembangan ilmu syariah pada umumnya dan dan Siyasah pada

khususnya serta menjadi rujukan peneliti berikutnya tentang perkembangan politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul: ***Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kota Payakumbuh*** ini yaitu:

Strategi	:	Perancanaan dan pengaturan suatu kegiatan dengan baik untuk mencapai suatu tujuan, dan dapat juga di artikan sebagai suatu peraturan potensi dan sumber daya agar dapat efesien memperoleh hasil sesuatu rancangan[10]
Partai Keadilan Sejahtera	:	Partai da'wah (dakwah) yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang di ridhai Allah SWT, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.[11]
Pemilihan umum	:	Suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.
PemiluPemilihan umum Legislatif	:	Pemilihan umum yang diadakan 5 tahun sekali untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR

[10]Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik,* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hal. 54

[11]Kompas, *Partai- Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009, ...* , hal. 305

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

   Penulis menggunakan jenis penelitian penelitian lapangan *(Field Research)*, yaitu jenis penelitian yang digunakan dengan wawancara secara langsung serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.[12] Penulis melakukan penelitian lapangan di Kantor DPD PKS Kota Payakumbuh.

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati dengan menggunakan logika ilmiah.[13]

3. Teknik Pengumpulan Data

   Untuk mempermudah penulis dalam pengumpulan data yang diperlukan maka dalam hal ini digunakan cara yang tepat dalam penelitian ini, yaitu wawancara.Wawancara adalah proses tanya jawab langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang di butuhkan dan melakuka pengamatan terhadap masalah yang dijadikan objek penelitian.[14] Adapun wawancara yang dilakukan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

---

[12]Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 25

[13]Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet. ke 1, hal. 53

[14]Cholid Narkubo dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), cet.Ke-1, hal.83

kepada informen peneliti, yaitu Ketua, sekretaris, pengurus Kantor DPD PKS Kota Payakumbuh, dan kader-kader PKS.

Metode wawancara ini digunakan untuk mencari data tentang strategi yang digunakan oleh DPD PKS dalam menghadapi pemilihan umum Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh.

4. Lokasi Penelitian dan Informan

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Jl. Sudirman No. 46, Balai Baru, Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat di kantor DPD Partai Keadilan Sejahterah (PKS) Kota Payaakumbuh.

b. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang stuasi dan kondisi latar belakang penelitian. Jadi, ia yang mempunyai banyak pengalaman tentang latar belakang penelitian, ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian, walaupun bersifat informal. Sehingga dapat menberikan pandangan tentang nilai-nilai, sikap, proses, kebudayaan yang menjadi latar belakang penelitian setempat.[15]

Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu ketua, sekretaris, pengurus Kantor DPD PKS Kota Payakumbuh, kader-kader PKS, dan orang-orang yang bisa memberikan informasi tentang stuasi dan kondisi latar belakang penelitian.

[15]Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 90

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mempermudah penulis dalam membahas permasalahan ini maka berikut ini penulis uraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan terkait judul "Stategi Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kota Payakumbuh".

BAB II Partai politik Islam di Indonesia dan pemilihan umum , terdiri dari gambaran umum tentang partai politik di Indonesia, partai politik Islam di Indonesia, konsep strategi politik, dan Konsep pemilihan umum di Indonesia.

BAB III Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh, terdiri dari profil Partai Keadilan Sejahtera, capian perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif, strategi yang digunakan PKS dalam pemilihan umum Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh, Analisis penulis terhadap strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemilihan umum Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh.

BAB IV Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PARTAI POLITIK DI INDONESIA

DAN PEMILIHAN UMUM

A. Gambaran Umum Tentang Partai Politik di Indonesia

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik di bentuk oleh para pemimpin politik Indonesia menyusul dikeluarkannya dekrit yang di buat oleh wakil presiden Mohammad Hatta. Dikeluarkan pada November tahun 1945. Dekrit tersebut mendorong para pemimpin untuk membentuk partai politik. Tujuan dekrit adalah menyediakan perwakilan langsung bagi semua kelompok penting bagi masyarakat Indonesia berdasarkan sistem perwakilan proporsional. Berbagai ideologi diusung oleh partai-partai politik yang dibentuk dari Oktober 1945, ketika rencana pemilihan um um diumumkan oleh pemerintah sementara, sampai September 1955, ketika pemilihan umum digelar.

Berikut ini beberapa contoh definisi mengenai partai politik yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut:

a. Partai Politik Menurut Miriam Budiardjo (1993)

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nalai dan cita-cita yang sama.

Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasan itu melaksanakan kebijakan mereka.

b. Partai Politik Menurut Sigmund Neumann (1963**)**

Partai politik adalah arganisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk mengusai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan-golongan lain yang mempunyai pandanggan yang berbeda.

c. Partai Politik Menurut Sartori

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.[16]

d. Partai Politik Menurut Carr (1965)

"*Political party is an organization that attemps to achieve and maintain control of government"* (Partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah).

e. Partai Politik Menurut Nimmo (1973)

"A political party is a coalition of fairly stable, enduring, and frequently conflicting interests, organized to mobilize in competitive election in order to control policy making".

f. Partai Politik Menurut Renny (1990)

[16]Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakata: Graha Ilmu, 2013), hal. 37

"A political party is an organization that sponsors candidates for politikal office under the organization's nam".[17]

g. Partai Politik Menurut Carl Friendrich (1967)

Partai politik adalah sebuah partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisasi yang stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan pengusaan pemerintah bagi pemimpin partai dan berdasarkan penguasaan ini akan memberikan manfaat bagi anggota partainya,baik idealisme maupun kekayaan material serta perkembangan lainnya.

h. Partai Politik Menurut Roger Soltau (1961)

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melakukan kebijakan mereka sendiri.[18]

i. Partai Politik Menurut Leon D. Epstein

"*Political party is any group, however loosely organized, seeking to elect governmental officeholders under a given label"* (partai politik adalah kelompok-kelompok, meskipun terorganisiasi secara sederhana, yang bertujun mendapatkan jabatan publik dalam pemerintahan dengan identitas-identitas tertentu).

j. Partai Politik Menurut Alam Ware

---

[17]Hafied Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, Tiori, Dan Strategi,* (Jakarta: Rajawali, 2014), hal. 166

[18]Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Politik,* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009), hal. 316

Mendefinisikan partai politik pada tiga kategori, yaitu:

1. Partai politik sebagai institusi yang membawa rakyat secara bersama-sama dalam mencapai kekuasaan di dalam negara. Partai melihat arti kegunaan ligitimasi dalam mengejar tujuan akhir partai. Mereka merasa yakin dapat mengikuti pemilihan umum pelaksanaan program dan tujuan pertama.
2. Partai sebagai lembaga yang mencari perwakilan kepentigan didalam sebuah masyarakat.
3. Partai politik adalah sekelompok orang atau masyarakat yang memiliki kesamaan keyakinan (atau ideologi), nilai dan perilaku.[19]

k. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011tentang Partai Politik pasal 1 ayat (1)

> Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia bedasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbagai definisi di atas dapat dipahami sebagai definisi normatif mengenai partai politik, apabila dikaitkan dengan realitas politik dimasa modern saat ini definisi yang berasal dari beberapa para ahli di atas masih tegak berdiri dalam realitas saat ini dalam konteks "*organisasi yang terorganisir*" tetapi dalam konteks tujuannya dari partai politik terlihat adanya pergeseran orientasi dalam melihat tujuannya.

---

[19]A. A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik (Memahaami dan Menerapkan),* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 191

Dapat di simpulkan bahwa partai politik adalah sekumpulan orang yang memfungsikan dirinya ke dalam sebuah organisasi politik terstuktur di setiap level yang berkerja secara kolektif dengan tujuan meraih sumber-sumber ekonomi dan akses pengaruh dalam wilayah kekuasaan publik (pemerintah) demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, untuk memperkuat teori dapat merujuk pada sederetan nama anggota partai politik yang terlibat masalah korupsi dan penyalah gunaan kekuasaan lainnya.[20]

Dari berbagai pengertian partai politik yang telah dikemukakan, ada 3 prinsip dasar dari partai politik, yaitu:

1) *Partai sebagai koalisi,* yakni membentuk koalosi dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas. Partai ini dibentuk atas dasar koalisi di dalamnya terdapat fraksi-fraksi.
2) *Partai sebagai organisasi,* yakni nantik menjadi institusi yang eksis, didamis dan berkelanjutan partai politik harus diorganisasi. Partai harus di bina dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, dan representasi dari sejumlah orang atau kelompok. Tugasnya mencalonkan anggota untuk pemilihan umum dengan label partai. Mengambil bagian dalam pemilihan umum, mengajukan calon yang disepakati, mengumpul dana, dan membuat isu propaganda dalam kampanye.
3) *Partai sebagai pembuatan kebijakan (policymaking).* Partai politik ini juga berbeda dari kelompok sosial lainnya dalam pengambilan kebijakan.

[20] Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik*,...,hal. 40

Partai politik mendukung secara konkret para calon yang mereka ajukan untuk menduduki jabatan- jabatan publik.

Dari tiga prinsip dasar partai diatas, maka bisa di bedakan antara partai politik, gerakan (*movement*) dan kelompok penekan. Gerekan adalah kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan, atau menciptakan suatu lembaga masyarakat baru dengan cara-cara politik. Gerakan ini sifatnya lebih terbatas, sifatnya fundamental, dan kadang-kadang bersifat ideologi.

Kelompok penekan biasanya lebih banyak digunakan dengan istilah kelompok kepentingan. Kelompok ini memperjuangkan suatu kepentingan dan memberi pengaruh terhadap kekuatan-kekuatan politik yang ada di perlemen untuk mundapatkan keputusan menguntungkan dan menghindari keputusan yang merugikan.[21]

Jadi dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa partai politik adalah sekelompok orang-orang yang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan yang menurut pendapat mereka pribadi paling idealis dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran dalam suatu tingkat negara.

2. Fungsi dan Tujuan Partai Politik di Indonesia

Dalam teori sistem, setiap keberadaan organisasi politik, tentunya memilikki struktur dan setiap struktur memiliki fungsi. Begitupun partai politik, sebagaimana kerangka sistem politik tentunya memiliki struktur

[21]Hafied Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, Tiori, Dan Strategi*,..., hal. 166

yang melahirkan fungsi-fungsi. Secara umum fungsi utama partai politik di mana pun adanya adalah sama, yakni sebagai salah satu pilar utama demokrasi.

Adapun secara khusus atau turunan dari fungsi politik itu adalah:

a. *Sosialisasi politik,* yaitu proses pembentukan sikap dari orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui peoses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.
b. *Pendidikan politik,* yaitu proses penyadaran dan pendewasaan politik para anggota masyarakat. Di sini anggota masyarakat diharapkan menjadi senantiasa "melek politik".
c. *Partisipasi politik,* yaitu mengajak atau mengikut sertakan para anggota masyarakat untuk terlibat dalam berbagai macam dan tingkatan kehidupan politik.
d. *Agregasi kepentingan,* yaitu sebagai jambatan (*bridge*) antara rakyat dan pemerintah melalui upaya menampung dan mengombinasikan tuntutan-tuntutan individu-individu dari para anggota masyarakat menjadi proposal (usulan) kebijakan publik yang signifikan.
e. *Rekrutmen politik,* yaitu proses seleksi calon-calon pemimpin yang akan mengisi berbagai jabatan publik atau jabatan politik.

Fungsi-fungsi partai politik di atas, bila ditinjau dari sudut tingkatan, dapatlah dipetakan ke dalam tiga tingkatan.

1) Di tingkatan mayarakat secara keseluruhan, partai politik memiliki fungsi

sebagai sebuah mekanisme umum yang berusaha menangani konflik yang terjadi di dalam masyarakat.

2) Di tingkatan sistem politik, partai politik memiliki fungsi sebagai institusi yang berfungsi memformulasikan kebijikan publik.
3) Di tingkatkan kehidupan politik, partai politik memiliki fungsi utama dalam rekrutmen politik bagi kandidat-kandidat terpilih agar menempati jabatan-jabatan publik.

Dengan beragamnya fungsi-fungsi partai politik, Miriam Budiardjo mengatakan bahwa terdapat perbedaan fungsi partai politik dalam negara demokratis menyelenggarakan beberapa fungsi: (1) sebagai sarana komunikasi politik; (2) sebagai sarana sosialisasi politik; (3) sebagai sarana rekrutment politik (4) sebagai sarana pengaturan konflik (*conflict management*). Sementara, partai politik untuk negara berkembang terdapat tiga fungsi pokok, yang menyediakan (1) dukungan basis masa yang stabil, (2) sarana integrasi dan mobilisasi, (3) memelihara kelangsungan kehidupan politik.

Dari keempat fungsi partai politik di atas, fungsi rekrutment dianggap selain memiliki hubungan bagaimana partai politik menjaring seseorang atau sekelompok orang sebagai kader politik, juga berhubungan dengan bagaimana seseorang baik dari "*in grup*" maupun "*out grup*" menjadi pimpinan partai atau pimpinan nasional (presiden atau wakil presiden). Dengan fungsi ini, menurut Mirian Budiardjo, partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut

aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.[22]

Dengan demikian, partai politik turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah dengan kontak pribadi, persuasi, dan lain-lain. Diusahakan untuk menarik golongan muda untuk di didik menjadi kader yang dimasa mendatang akan mengganti pimpinan lama. Partai politik memiliki peranan penting di dalam mempersiapkan kader partai atau figur nasional untuk dicalonkan dalam proses pemilihan presiden.

Dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008, Pasal 10, 11 tentang tujuan dan fungsi partai politik di Indonesia sebagai berikut:

Pasal 10

1. Tujuan umum Partai Politik adalah:
   a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana di maksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuaan Republik Indonesia;
   c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
   d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Tujuan khusus Partai Politik adalah:
   a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
   b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
   c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Tujuan Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

Pasal 11

1. Partai politik berfungsi sebagai sarana:
   a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

[22]A. A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik (Memahami dan Menerapkan)*,..., hal. 198

b. Pencipta iklim yang kondisif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
c. Penyerap penghimpunan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan keadilan gender.

2. Fungsi partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

3. Tipologi Partai Politik

Membahas tipologi politik ini berarti kita berbicara tipe-tipe atau jenis-jenis partai politik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Tipologi atau pengklasifikasian berbagai partai poltik dapat di jumpai atau di ketahui dari tiga dasar kriteria, yaitu asas dan orientasi, komposisi dan fungsi, basis sosial dan tujuan.

a. Dari sisi asas dan orientasi.

Partai politik dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe, partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan.

1. Partai politik pragmatis adalah suatu partai yang mempunyai program dan kegitan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu.
2. Partai politik doktriner adalah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabat ideologi.
3. Partai politik kepentingan merupakan suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

b. Berdasarkan komposisi dan fungsi.

Partai poltik dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu partai massa atau lindungan (*patronage party*) dan partai kader.

1. Yang dimaksud dengan partai massa adalah partai yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara tindakan pengarahan massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkaan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan dan kesatuan nasional dapat di pellihara, tetapi masyarakat dapat tindakan pengarahan untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu.
2. Yang dimaksud dengan partai kader adalah suatu partai yang mengendalkan kualitas anggota, kedekatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai keguatan utama.

c. Berdasarkan basis sosial dan tujuan.

Partai politik dapat digolongkan pada empat tipe, yaitu:

1. Partai politik yang beranggotaan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah dan bawah.
2. Partai politik anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan pengusaha.
3. Partai politik yang anggota-angotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Katholik, Protestan, dan Hindu.
4. Partai politik yang angota-angotanya berasal dari budaya tertentu,

seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu.[23]

B. Partai Politik Islam di Indonesia

1. Pengertian Partai Politik Islam

Sistem demokrasi di Indonesia lahir setelah runtuhnya orde baru dibawah kekuasaan Soekarno yang sangat otoriter dari menutup akses masyarakat untuk demokrasi secara langsung. Sekarang Indonesia telah diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan tanpa ada paksaan seperti adanya partai politik baik itu politik Nasionalis maupun partai politik Islam, melalui partai politik tersebut masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui partai politik Islam yang menurut masyarakat mereka akan amanah dalam membela hak mereka sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An- Nisa' ayat: 58, yaitu:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا (ا لنسا ء/٤: ٥٨)

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat". (Q.S An- Nisa': 58*)*

Dari ayat di atas dapat di jelaskan bahwa pemimpin itu harus amanah dalam segala hal, baik itu terhadap dirinya, maupun terhadap keluarga, maupun orang yang dipimpinnya begitu juga terhadap partai politik. Dan

[23]A. A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik (Memahami dan Menerapkan)*,...,hal. 200

seorang pemimpin haruslah adil dalam menetapkan putusan. Banyak yang beranggapan bahwa setiap negara harus mempunyai partai politik, banyak yang beranggapan pula bahwa negara yang memiliki partai politik adalah negara maju.[24]

Figh siyasah terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Figh secara bahasa adalah tahu, paham, dan mengerti. Dan padat juga dipahami figh adalah keterangan tentang pengertian dan paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Jadi fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.

Secara terminologi, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai dengan amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalil yang tafshili (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur'an dan As-Sunnah).[25] Yang dimaksud dengan dalil-dalil terperinci dari pengertian di atas adalah bukanlah dalil yang mubayyan atau dalil yang dijelaskan didalamnya rincian secara detail. Maksudnya setiap hukum perbuatan *mukallaf* yang dibahas dalam ilmu fiqh itu masing-masing ada dalilnya.[26]

Fiqh siyasah membicarakan perundang-undagan, yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hungungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar

---

[24]Inu Kencana Syafeei, *Pengantar Ilmu Politik,...*,hal. 1316

[25]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Hal.13

[26]Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,* (Jakarta: Erlanga, 2008), hal. 2

warga negara. Siyasah adalah mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana mengatur kaum, memerintah, dan memimpin. Menurut istilah siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Siyasah diartikan pula dengan "politik" sebagai mana uraian ayat-ayat Al-Qur'an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata hukum.[27]

Dikalangan teoritis politik Islam, ilmu fiqh siyasah sering di sinonimkan dengan ilmu siyasah syar'iyyah yang oleh Abdul Wahab Khalaf didefinisikan sebagai berikut, "ilmu siyasah syar'iyyah" (ilmu fiqh siyasah) adalah ilmu yang membahas tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam, perundang-undangan dan berbagai peraturan yang sesuai dengan perinsip-perinsip Islam, mengenai penatapan semua persoalan itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya.

Berdasarkan pengertian dari etimologi dan terminologi yang dijelaskan di atas dapat di tarik kesimpulan, fiqh siyasah adalah ilmu tentang negara Islam secara spasifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Siyasah yang adil adalah siyasah yang harus ditumbuh, berkembang serta di lestarikan. Sebaiknya siyasah yang zalim tidak patut dilakukan. Yang mana siyasah adil bercampur dengan siyasah yang zalim, sehingga

[27]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam,...*,Hal. 25

dalam waktu yang bercampur antara yang benar dengan yang salah. Allah SWT melarang menciptakan suasana demikian. Dalam Al-Qur'an secara sangat tegas dijalaskan:

وَلَا تَلۡبِسُواْ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ وَتَكۡتُمُواْ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ (ا لبقرة/٢: ٤٢)

Artinya:

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui" (Q.S Al-Baqarah: 42).

Dengan demikian, ilmu fiqh siyasah menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai, setiap peraturan yang secara resmi yang ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, wajib di patuhi sepenuh hati.[28] Kewajiban ini diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya (Q.S An-Nisa: 59) yang berbunyi sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا (ا لنسا ء/٤ :٥٩)

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (Q.S An-Nisa: 59).

Jadi Partai politik Islam adalah sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui

[28] Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*,...,hal. 10

penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik dalam level Legislatif maupun Eksekutif.[29]

2. Tujuan Politik Islam

Tujuan utama yang hendak dicapai dari politik Islam, menurut Abdul Wahab Khalaf, adalah agar yang mempelajar ilmu ini dapat memahami bagaimana menciptakan sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan dapat menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya sebuah sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

Menurut Abdurrahman Taj menyatakan, tujuan yang hendak dicapai dari studi fiqh siyasah ini adalah agar setiap orang mempelajari memperoleh pengetahuan yang memadani tentang politk Islam, sehingga ia dapat memahami bagaimana seharusnya menyikapi dinamika kehidupan dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup sesuai tuntunan Islam, serta mampu merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat di segala waktu dan tempat dengan cara yang relevan atau sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam yang bersifat umum.[30]

3. Politik Islam Era Reformasi

Seiringan dengan kejatuhan Orde Baru, umat Islam memanfaatkan momentun reformasi untuk menyusun kembali perjuangan penegakan syari'at Islam di jalur politik. Diantaranya cita-cita menjadikan Islam

[29]Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam Tiori Dan Praktik Di Indonesia,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 8

[30]Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*,..., hal. 17

sebagai landasan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Asas tunggal yang diterapkan Soeharto resmi di cabut dan masyarakat berhak membuat partai-partai sesuai ideologi mereka. Hal ini dimanfaatkan oleh umat Islam dengan mendirikan partai-partai Islam dengan orientasi, visi, dan misi perjuangannya.

Sebelum membahas tentang politik Islam pada era Reformasi, perlu kiranya dijelaskan tentang sebab-sebab kejatuhan Orde Baru. Soeharto telah kerkuasa lebih dari tiga dasawarsa dan di dukung oleh kekuatan militer serta segala infrastrukturnya ternyata tumbang di tangan garakan rakyat yang di motori mahasiswa, tetapi inilah yang dialami oleh Orde Baru. Soeharto akhirnya jatuh dari kekuasaan. Sebenarnya banyak indrikasi yang memperlihatkan peraturan ini sangat rapuh dan hanya dapat berdiri dengan kekuatan yang totaliter dan otoriter. Yang mana perbedaan pendapat dikekang, oposisi dilarang. Orang-orang yang bersuara lantang biasanya akan menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Pembunuhan terhadap hak-hak perdata orang yang mengkritik kebijakan Orde Baru adalah hal lazim sekali terjadi.

Prestasi yag diklaim Orde Baru sebagai kemajuan pesat, terutama dalam bidang ekonomi, hanya menciptakan jurang pemisah dan kesenjangan sosial. Rakyat kecil mengalami perlakuan diskriminatif dari peguasa. Belum lagi sistem politik dan hukum yang diciptakan peraturan Orde Baru yang jelas-jalas sangat sentralistik dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Ketiga hal untuk memperoleh gambaran betapa rapuhnya peraturan Orde

Baru sehingga akhirnya tumbang pada 21 Mai 1998.

Tokoh yang dipandang sebagai lokomotif reformasi adalah Mohammad Amien Rais, yang pertama mengulirkan isu sukses presiden dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah ke-73 di Surabaya pada tahun 1993. Dalam satu makalahnya bejudul "*Suksesi 1998: Suatu keharusan*", Amien Rais menegaskan pandangannya. Kesediannya untuk mempercepat pemilihan umum dan memberi kesempatan yang luas kepada rakyat untuk membentuk partai, ini yang dilakukan oleh Habibie. Antusiasme masyarakat mendirikan partai besar sekali. Hal ini ditandai dengan munculnya tidak kurang dari 150 partai politik baru hanya dalam kurun waktu enam bulan. Dari jumlah tersebut, yang mendapat pengesahan dari Departemen Kehakihan dan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilihan umum ada 48 partai.

Masing-masing partai telah memiliki visi, misi. platform, dan ciri khasnya. Dari 48 partai tersebut, sebagian besar menganut Pancasila sebagai asas, sebagain menganut Islam, satu menganut asas demokrasi religius (Partai Uni Demokrasi Indonesia pimpinan Sri-Bintang Pamungkas) dan satu menganut asas sosial demokrasi kerakyatan (Partai Rakyat Demokratik pimpinan Budiman Sudjatmiko). Tentang partai-partai Islam, dapat dikatakan bahwa sebagian diantaranya merupakan jelmaan dari partai-partai Islam pada era Demokrasi Liberal dan pemilihan umum tahun 1955.

Pada pemilihan umum tahun 1955 terdapat partai-partai Islam seperti, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PSII, maka pada era awal reformasi

terdapat belasan partai yang mengaku memiliki hubungan historis dengan partai-partai tersebut. Dikalangan NU terdapat beberapa partai, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pimpinan Matori Abdul Jalil, Partai Kebangkitan Umat (PKU) pimpinan K.H. Yusuf Hasjim, Partai Nahdlatul Ummat (PNU) pimpinan K.H. Sjukron Makmun, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI) pimpinan Abu Hasan. Namun dari semua partai yang berbasis NU tersebut, hanya PKB yang di akui oleh Abdurrahman Wahid sebagai partai resmi NU. Ia sempat mengatakan bahwa PKB ibarat telur yang keluar dari ayam sedangkan partai-partai lain ibarat kotorannya.

Selain partai-partai yang berkaitan historis dengan partai-partai Islam era tahun 1955, ada pula partai-partai Islam lain yang baik secara tegas menyebutkan Islam sebagai asasnya maupun yang mayoritas konstituennya umat Islam. Untuk kolompok pertama terdapat Partai Umat Islam (PUI) pimpinan Deliar Noer, Partai Keadilan (PK) pempinan Nur Mahmudi Ismail, dan Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (KAMI) yang di pimpin Syamsahril. Partai lain yang tidak menjadikan Islam sebagai dasar ideologi namun berbasis masa Muslim adalah Partai Amanat Nasional (PAN) yang didirikan oleh M. Amien dan Partai Umat Muslimin Indonesia (PUMI) pimpinan H. Anwar Junus.

Demikianlah partai-partai Islam yang lahir pada era Reformasi tahun 1998. Dari 48 partai peserta pemilihan umum, terdapat 16 partai Islam atau berbasis masa umat Islam. Namun jumlah partai Islam yang tersebut tidak menjamin perolehan suara bagi mereka. Terbukti, pada pemilihan umum

tahun 1999 partai-partai Islam tidak dapat berbuat banyak. Pemilihan umum tahun 1999 menghasilkan lima pemenang, yaitu sebagai berikut:

a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jumlah kursi 154 kursi dan total suara 35,6 juta;
b. Partai Golongan Karya (Golkar) jumlah kursi 120 kursi dan jumlah total suara 23,7 juta;
c. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jumlah kursi 59 kursi dan total suara 11,3 juta;
d. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jumlah kursi 51 kursi dan jumlah total suara 13,3 juta;
e. Partai Amanah Nasional (PAN) jumlah kursi 35 kursi dan jumlah total suara 7,5 juta.

Sementara partai-partai Islam lainnya juga memperoleh suara dan kursi di DPR RI yang kecil. Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh 13 kursi, Partai Kesatuan 6 kursi, PNU 3 kursi, PKU dan PSII masing-masing satu kursi. Dengan demikian, total kursi partai-partai Islam adalah 169 kursi. Dalam perkembangan politik selanjutnya, ketika proses pemilihan Presiden RI di MPR, partai-partai Islam memiliki satu suara dalam Poros Tengah yang digalang oleh lokomotif reformasi, Amien Rais untuk menggolkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Kerja sama ini membuahkan hasil ketika terjadi perseteruan yang semakin memanas antara calon Presiden Habibie dari Partai Golkar dan Megawati Soekarno Putri yang diusung oleh PDI Perjuangan Amien Rais bersama partai-partai Islam lainnnya, dalam

Sidang Umum MPR 20 Oktober 1999, berhasil mendudukkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI pertama dalam masa Reformasi mengalahkan Megawati. Keberhasilan poros tengah mengantar Abdurrahman Wahid menjadi presiden dapat di pandang sebagai kemenangan sementara politik Islam atas kelompok nasionalis sekuler.

Salah satu peran Megawati adalah mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum yang kedua pada masa reformasi. Hasil final verifikasi faktual KPU telah menetapkan 24 partai politik yang berhak menjadi peserta pemilihan umum tahun 2004. Dari 24 partai politik itu, ada lima partai Islam, yakni PPP (Hamzah Haz), PBB (Yusril Ihza Mahendra), PKS (Hidayat Nur Wahid), PBR (K.H. Zainuddin MZ), dan PPNUI (K.H. Syukron Ma'mun), di samping PAN yang memiliki basis masa organisasi Muhammadiyah dan PKB yang basis konstituen tradisionalisnya dari kalangan NU. Dalam pemilihan anggota Legislatif, di tubuh partai Islam terjadi perkembangan menarik ketika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK) yang memperoleh suara yang signifikan, yakni sekitar 7,3 persen suara nasional dan 48 kursi di DPR. Pada pemilihan umum tahun 1999 Partai Keadilan (PK) hanya memperoleh 6 kursi di DPR.

Pada pemilihan umum Presiden terdapat perkembangan baru yang menarik. Pemilihan Presiden pada tahun 2004, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1994 yang telah diamademen, dilakukan oleh seluruh rakyat yang berhak, bukan lagi oleh MPR. Dalam pemilihan umum

langsung yang pertama ini muncul lima pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu:

1) Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakil M. Yusuf Kalla,
2) M. Amien Rais dengan wakil Siswono Yudhohusodo,
3) Megawati dengan wakil Hasjim Muzadi,
4) Wiranti dengan wakil Solahuddin Wahid, dan
5) Hamzah Haz dengan wakil Agum Gumelar.

Pada pemilihan umum tahun 2004 ini dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakil M. Yusuf Kalla. Ini dianggap sebagai program yang membantu rakyat sehingga dalam pemilihan Presiden tahun 2009, SBY yang kemudian yang dipasangkan Boediono dapat memenanggkan kembali pertarungan mengalahkan pasangan Megawati dengan wakil Probowo dan Yusuf Kalla dan Wiranto. Berbeda dengan pemilihan umum lima tahun sebelumnya, pemilihan umum tahun 2009 berlangsung hanya satu kali putaran, karena pasangan SBY-Boediono berhasil mengumpulkkan lebih dari 60 persen suara. Kemenangan SBY-Boediono ini juga mendapat dukungan sebagian besar partai-partai Islam. Partai-partai, seperti PKS, PPP, PBB, dan PAN adalah seberapa partai yang ikut berjuang memenangi pasangan SBY-Boediono.[31]

4. Sejarah Partai Politik Islam PKS di Indonesia

Partai politik Islam telah lama mewarnai pentas sejarah tanah air. Sejarah partai Islam dimulai dari pendirian Serekat Islam (SI) pada tanggal

[31] Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 303

11 November 1912 di Solo. Jika di lacak dari rentang waktunya, maka perjalan partai politik Islam bisa di bagi beberapa periode, yaitu: pra kemardekaan, pasca kemardekaan, orde baru, dan pasca-orde baru. Dalam hal ini penulis fokus membahas partai politik Islam Partai Keadilan Sejahtera (PKS).[32]

Adapun mengatur tentang sistem politik Indonesia yang terakhir yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.[33] Begitu banyak partai politik salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Keadilan secara resmi didirikan pada 20 Juli 1998.[34]

Pemilihan umum pertama di era Reformasi yang diadakan pada tanggal 7 Juli 1999. Partai Keadilan sendiri terbukti gagal memperoleh batas minimal suara (*electoral treshold*) sebagai syarat mengikuti pemilihan umum selanjutnya. Yang mana menjadi salah satu penyebabnya anjloknya suara di Pemilihan umum yaitu ketertutupan Partai Keadilan. Partai ini hanya meraih 1,36 persen dari total suara pemilihatau sekitar 1,4 juta pemilih. Partai Keadilan (PK) sendiri berada di urutan ketujuh. Akhirnya setelah melalui pertentangan alot, pada 1 September 1999, pembagian kursi disepakati. Partai Keadilan (PK) mendapat tujuh kursi di parlemen.

Gagal mencapai *electoral threshold* maka Partai Keadilan (PK) tidak

---

[32]A. Qodri A. Azizy. dkk , *Jejak-Jejak Islam Politik,* (Jakarta: Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama RI, 2004), hal. 5

[33]Hafied Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, Tiori, Dan Strategi*,..., hal. 169

[34]Kompas, *Partai- Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009,* (Jakarta: Kompas, 2004), hal. 304

dapat mengikuti Pemilihan umum tahun 2004 kecuali berganti nama dan lambang. Maka Partai Keadilan (PK) harus beralih nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 20 April 2002. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat kabupatan dan kota). [35]

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah mendaftarkan secara resmi ke Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) pada 27 Mai 2003, akhirnya dapat disahkan sebagai partai politik yang berbadan hukum pada 17 Juli 2003.[36] Sehari kemudian, Partai Keadilan (PK) bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penggabungan ini sekaligus menandai hak milik Partai Keadilan (PK) menjadi milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka Partai Keadilan (PK) resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pada Pemilihan umum tahun 2004, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraih pencapaian yang di signifikasi. Partai ini meraih 7,34 persen suara atau sekitar 45 dari total 550 kursi di perlemen. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) duduk di urutan keenam dan lolos *electoral threshold.* Partai-partai besar pun mulai mendekati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk

---

[35]Tim Divora Yugha E, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu,* (Jakarta: Kompas, 2004), hal. 69

[36]Kompas, *Partai- Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009,...*, hal. 301hal. 304

berkoalisi.

Pada Pemilihan umum tahun 2009 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil menaikkan perolehan suara dengan total 7,88 persen suara pemilih atau urutan keempat. Partai Keadilan Sejahtera pun mendapatkan 57 kursi di perlemen. Meski gagal mencapai target 20 persen suara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menjelma menjadi partai Islam besar. Suaranya mengungguli partai-partai Islam lainnya seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembanginan (PPP).

Memasuki tahun politik 2014, dengan memantapkan jargon: Cinta, kerja dan harmoni, saatnya para calon Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk tampil beda, lebih gaul terbuka untuk menerima semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama dan lain-lain, ujur mantan sekretraris. Jenderal partai dakwa itu.[37]

Jadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sendiri adalah suatu *Jam'iyyah* yaitu sekelompok orang yang beraneka ragam dari lintas suku, bahasa warna kulit namun, mempunyai ideologi yang satu terutama di bidang politik. Kader-kader Partai Keadilan memang dikenal sangat militan. Salah satu contoh menarik dari sekian banyak partai politik hanya kader Partai Keadilan Sejahtera mempunyai keistimewaan yang menjadikannya yang bernuansa Islam (dakwa). Tidak seperti keorganisasian keagamaan lainnya yang memisahkan antara elemen dakwa dan elemen lainnya khususnya politik.

[37]Tim Divora dan Yugha E, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu,...*, hal. 70

C. Konsep Strategi Politik

1. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "stategia" yang di artikan sebagai "the art of general" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam perperangan. Sedangkan strategi dalam kamus bahasa Indonesia (KBI) diaratikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.[38]

Pengertian strategi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a. Menurut Mintzberg

Konsep strategi sekurang-kurangnya mencakup lima pengertian, yaitu sebagai berikut:

1) Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang di tempuh oleh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya;
2) Sudut yang di pisahkan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya;
3) Acuan yang berkenan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi;
4) Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya;
5) Rincian langkah teknis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing.

b. Menurut Webter's New World Dictionary Dalam Trout

[38]Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik*,..., hal. 47

Strategi adalah bagaimana menggerakkan pasukan ke posisi paling menguntungkan sebelum pertempuran dengan musuh, inti dari pertahanan hidup, persepsi, menjadi beda, persaingan spesialis, kesederhanaan, kepemimpinan, dan realitas.[39]

c. Menurut Steinberg

Dikutip oleh Venus strategi di artikan sebagai rencana untuk tindakan, penyusunan dan pelaksanaan mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya.

d. Menurut Liddel Hart

Liddel Hart berpendapat bahwa ada beberapa esensi dari strategi antara lain:

1. Atar tujuan sesuai dengan maksud,
2. Selalu tetapkan sasaran dalam pikiran,
3. Pilih harapan yang paling mungkin,
4. Berani melawan yang paling mungkin untuk di lawan,
5. Ambil arah operasi yang menawarkan alternatif obyektif,
6. Pastikan bahwa rencana dan formasi strategi sifatnya fleksibel dan adaptif dengan waktu dan keadaan mendadak.

e. Menurut Gregory

Gregory memberikan pendapat yang memiliki substansi yang sama terhadap pendapat Steinberg, Gregory menjelaskan strategi pada hakikatnya adalah perancanaan dan manajemen untuk mencapai sebuah tujuan. Stategi

[39]Abdul Hanan, *Strategi Pemenangan Dakwa,* (Jawa Barat: Mc Publishin, 2015), hal. 20

adalah pendekatan secara keseluruhan untuk suatu program atau kampanye.[40]

Jadi, strategi adalah faktor pengkordinasian, prinsip yang menjadi panutan, ide utama, dan pemikiran di balik program taktis. Singkatnya strategi adalah bagaimana mencapai tujuan dan taktik adalah apa yang akan di gunakan. Dan strategi politik adalah strategi yang di gunakan untuk merealisasi cita-cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam adminitrasi pemerintahan atau dijalankannya program desentralisasi. Tanpa strategi politik perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan. Dalam strategi politik sangat penting mengenal strategi komunikasi. Strategi komunikasi sangat penting sehingga membawa keuntungan yang jelas bagi seorang, atau yang selama ini diabaikan oleh lawan.

2. Strategi Politik

Pada politik setiap orang harus mempersiapkan rencana-rancana yang sesuai dengan pemahaman lebih dahulu, kurang lebih rencana yang telah terolah untuk antisipasi setiap orang, bukan saja dalam serangan-serangan akan tetapi juga tentang jawaban-jaawaban dan alat-alat untuk menyelesaikannya. Rencana memperjuangkan ini merupakan strategi yang mana unsur-unsur yang berbeda di dalamnya, tindakan melawan musuh dan jawaban terhadap reaksinya merupakan taktik. Analisa strategi politik tetap

[40]Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik*,...,hal. 48

agak terpisah-pisah, kecuali dalam hubungan internasional dan konflik-konflik serikat buruh. Yang di mana di sini kita membahas seluruh perjuangan politik secara keseluruhan. Dalam global hanya beberapa garis besar umum bisa diberikan, diantaranya sebagai berikut:

a. Konsentrasi atau penyebaran senjata-senjata politik;
b. Penyebaran senjata politik dan demokrasi;
c. Perjuangan terbuka dan diam-diam.[41]

D. Pemilihan Umum di Indonesia

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum sebagai presedur demokrasi (atau juga sering disebut pemilihan umum sebagai pesta demokrasi) adalah untuk membentuk suatu kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Berikut ini beberapa contoh definisi mengenai Pemilihan Umum yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut:

a. Pemilihan umum menurut Samuel P. Huntington

Pemilihan umum adalah pengejawatahan penting dari "demokrasi prosedural". Dalam buku "Gelombang Demokrasi Ketiga" menyebutkan bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara

[41]Maurise Duvergen, *Sosiologi Politik,* Diterjemahkan Daniel Dhakidae, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hal. 283

kompetitif oleh rakyat yang mereka (bakal) pimpin.

b. Pemilihan umum menurut Robert Dahl

Pemilihan umum adalah gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern.[42]

c. Pemilihan umum menurut Huntington

Pemilihan umum sebagai media pembangunan partisipasi politik rakyat dalam negara modern. Partisipasi merupakan arena seleksi bagi rakyat untuk mendaptkan jabatan-jabatan penting pemerintahan, baginya negara modern adalah negara demokratis yang memberi ruang khusus bagi keterlibatan rakyat dalam jabatan-jabatan publik. Setiap jabatan publik ini merupakan area kompetisi yang di perebutan secara wajar dan melibatkan setiap warga negara tanpa diskriminasi rasial, suku, agama, golongan (bangsawan dan rakyat jelata) dan streo type lainnya yang meminimalkan partisipasi setiap orang.

d. Pemilihan umum menurut Lawrence Le Duc

Pemilihan umum adalah sebuah lembaga politik yang mendorong (*leads*) dan mencerminkan banyak kecenderungan sosial, politik, dan ekonomi. Miski pemilihan dan demokrasi bukan konsep yang sinonim namun adanya pemilihan yang bebas dan kompetitif tidak keliru lagi di pandang sebagai salah satu ciri kritis yang menetapkan suatu bangsa sebagai bangsa yang demokratis.

e. Pemilihan umum menurut Aurel Croissant dan kawan-kawan

---

[42]A. A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik (Memahami dan Menerapkan)*,..., hal. 207

Pemilihan umum adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Tatapi, pemilihan umum saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan dari sekedar pemilu. Namun, demokrasi perwakilan sangat tergantung pada pemilihan umum. Sarana yang penting untuk mencapai sarana-sarana ini ialah sistem pemilihan umum (Pemilu).

f. Pemilihan umum menurut Paimin Napitupulu

Pemilihan umum adalah rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintah. Jadi melalui pemilihan umum, rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintah. Dengan demikian, pemilihan umum adalah sebuah mekasisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagai rakyat menjadi pemimpin pemerintah.[43]

Pemilihan umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1ayat (1)

> Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkannya terbentuk sebuah pemerintah perwakilan menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat,

[43]Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik*,..., hal. 34

oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pemilihan umum demokratis adalah kompetisi politik di antara peserta pemilihan umum untuk meraih jabatan politik di pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara yang sah dengan menekankan hadirnya prinsip-prinsip demokrasi pada aspek persiapan pemilihan umum dan pelaksanaan pemilihan umum. Prinsip-prinsip pemilihan umum yang dimaksud adalah yang berlaku secara universal.[44]

Jadi dapat disimpulkan pemilihan umum adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu yang memungkinkannya terbentuk sebuah pemerintah perwakilan menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

2. Fungsi Pemilihan Umum

Dalam literatur studi ilmu politik, berkait dengan pemilihan umum sebagai prosedur demokrasi, setidak-tidaknya terdapat lima fungsi pemilihan umum (upaya mencapai tujuan pemilihan umum) yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang juga berhubungan dengan tujuan pemilihan umum itu.

a. Fungsi untuk mengatur prosedur seorang untuk di pilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau jadi kepala pemerintah.
b. Pemilihan umum sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa. Keterkaitan pemilihan umum dengan elit di dasarkan pada

[44]Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik*,..., hal. 35

asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas.

c. Berfungsi sebagai perwakilan politik. Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik dalam rangka mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkan.
d. Sebagai sarana Legitimasi politik. Fungsi ini menjadi utama bagi kebutuhan pemerintah dan sistem politik yang mewadahi format pemilihan umum yang berlaku. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program kebijakan yang dihasilkan.
e. Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat. Pemilihan umum merupankan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka, dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Dalam kontek Indonesia, perwujudan konsep dan fungsi pemilihan umum demikian, secara fundamental diakui dan dijamin oleh UUD 1945, yang antara lain berisi sebagai berikut:

1) "*...mencerdaskan kehidupan bangsa...*" (Pembukaan UUD 1945)
2) "*...maka disusunlah kemardekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.*" (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945)
3) "*Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh*

Majelis Permusyawarata Rakyat. ” (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945)

4) “*Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatua badan yang bernama Majelis Permusyawarata Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.*” (Penjelasan UUD 1945)[45]

3. Tujuan Pemilihan Umum

Yang mana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, BAB II Pasal 4 tentang fungsi pemilihan umum di Indonesia sebagai berikut:

Pengaturan penyelenggara pemilihan umum bertujuan untuk:

a. Memperkuat sistem ketatanegaran yang demokrasi;
b. Mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas;
c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilihan umum;
d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilihan umum; dan
e. Mewujudkan pemilihan umum yang efektif dan efisien.

4. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum diataur dalam peraturan perundang-undangan, berarti kita berbicara tiga varibel pokok, yaitu:

a. Penyuaraan (*balloting*)

Penyuaraan adalah tata cara atau prosedur yang harus dimiliki pemilih yang berhak memberi suara. Pemilihan yang dihadapi pemilih biasanya terdiri dari tiga kemungkinan, yaitu memilih partai, memilih calon, atau keduanya (partai politik dengan daftar calonnya)

b. Daerah pemilihan (*elektorat edistrict*)

[45]A. A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik (Memahami dan Menerapkan)*,..., hal. 208

Daerah pemilihan adalah ketentuan yang mengatur beberapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan. Apakah suatu kursi berdistrik atau lebih dari satu kursi perdaerah pemilihan. Dalam menentukan daerah pemilihan ini, setidak-tidaknya terdapat dua faktor yang selalu di pertimbangkan, yakni wilayah administratif dan jumlah penduduk.

c. Formula pemilihan

Formula pemilihan adalah rumus yang digunakan untuk menuntukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah. Formula pemilihan dibedakan menjadi tiga, yakni formula pluralitas, formula mayoritas dan formula perwakilan berimbang (*propotional refresentation-PR*). Adapun penjabaran sebagai berikut:

1) *Formula pluralitas.* Formula ini menerangkan bahwa seseorang atau suatu partai politik dapat dikatakan menang pada suatu daerah pemilihan manakala orang atau partai tersebut berhasil memperoleh suara lebih banyak dari pada calon-calon atau partai-partai lain, baik perbedaan suatu suara ataupun lebih. Pemilihan anggota Kongres di Amerika Serikat menggunakan formula pluralitas ini.
2) *Formula mayoritas.* Formula ini menerangkan bahwa seorang calon atau partai politik dikatakan menang apabila meraih suara sebanyak dengan rumus 50% + 1.
3) *Formula perwakilan berimbang* (*PR*). Formula ini menerangkan bahwa setiap partai politik akan memperoleh kursi sesuai jumlah suara

yang di peroleh. Jumlah suara per kursi ditetapkan lebih dahulu (jumlah pemilih yang menggunakan haknya di bagi dengan jumlah kursi yang ditetapkan untuk daerah pemilihan yang bersangkutan), untuk kemudian kursi di bagi berdasaarkan jumlah suara yang di peroleh setiap partai peserta pemilihan umum.

Selain formula pemilihan di atas, dalam literatur ilmu politik di kenal juga dua sistem pemilihan, yaitu sebagai berikut:

a. Sistem distrik

Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan berdasarkan atas kekuasaan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecil daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Sistem ini lazim di gunakan di negara Inggris, Kanada, Amariaka Serikat, dan India.

Kelemahan signifikan dari sitem distrik diantaranya sebagai berikut, yaitu:

1. Sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpancar dalam beberapa distrik;
2. Sistem ini kurang representatif karna calon yang kalah dalam suatu distrik, otomatis kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Hal ini dianggap tidak adil oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan.

Kelebihan sistem distrik diantaranya sebagai berikut, yaitu:

1) Karena kecilnya distrik,wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungan dengan penduduk distrik lebih erat. Dengan demikian, dia akan lebih terdorong untuk memperjuangkan kepentingan distrik;
2) Sistem ini lebih mendorong ke arah integritas partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam sistem distrik pemilihnya hanya satu;
3) Berkurangnya partai dan meningkatnya kerja sama antara partai-partai mempermudah terbentuknya pemerintahan stabil dan memperkuat stabilitas nasional;
4) Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.

b. Sistem perwakilan berimbang

Sistem ini awalnya dimaksudkan untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Adapun gagasan pokoknya adalah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara uang diperolehnya. Dimana setiap daerah pemilihan memilih sejumlah wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan.

Kelemahannya sitem perwakilan berimbang diantaranya sebagai berikut, yaitu:

1. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru. Dengan kata lain, sistem ini umumnya mempunyai akibat memperbanyak jumlah partai politik;

2. Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan kurang merasa loyalitas kepada orang atau masyarakat yang telah memilihnya;
3. Banyaknya partai mempersukar terbentuknya pemerintahan yang stabil, karena umumnya harus mendasarkan dari atas koalisi dari dua partai atau lebih.

Kelebihan atau keuntungan dari sistem perwakilan berimbang ini adalah bahwa dia bersifat representatif dalam arti bahwa setiap suara turut dan diperhitungkan dan praktis dan tidak ada suara yang hilang. Sistem ini cocok bagi masyarakat heterogen karena menguntungkan bagi masing-masing kelompok masyarakat.[46]

5. Pemilihan Umum di Era Reformasi

Setelah presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada 21 Mai 1998, jabatan presiden digantikan oleh wakil presiden Burhanuddin Yusuf Habibie. Atas desakan publik, pemilihan yang akan dilakukan dengan dipercepat dan segera di laksanakan, sehingga hasil pemilihan umum tahun 1997 segera diganti. Kemudian ternyata pemilihan umum dilaksanakan pada 7 Juni 1997 sudah di anggap tidak dipercaya.

Keadaan ini berarti bahwa dengan pemilihan umum di percepat yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tapi presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum menyelengkarakan pemilihan umum yang di percepat ini

[46]A. A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik (Memahami dan Menerapkan)*,..., hal. 209

pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang pemilihan umum, dan RUU pemilihan umum tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Ketiga draf RUU ini disiapkan oleh sebuah tim Depertemen Dalam Negeri yang disebut tim 7 yang di ketuai Prof. Dr. M. Rasyid (Rektor IIP Depdagri Jakarta). Peserta pemilihan umum kali ini adalah 48 partai politik. Ini lebih jauh sedikit dibandingkan dengan jumlah partai politik yang ada dan terdaftar di Depertemen Kehakiman dan HAM yakni 141 partai.[47]

BAB III

STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH

A. Profil Partai Keadilan Sejahtera

1. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh

Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh semenjak di deklarasikan langsung dari pusat secara serempak. Secara Nasional berdirinya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 20 April 2002. Tepatnya di Kota Payakumbuh tanggal kapan di deklarasikannya tidak ada yang tahu. Yang mana partai politik ini berdasarkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pada tanggal 20 April 2002 berdirinya secara Nasional.[48] Partai

[47]Miftah Thoha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 127

[48]Yudhi Andrianto, Bidang Humas, *Wawancara Pribadi*, di Kantor DPD PKS Kota Payakumbuh, Tanggal 28 September 2019 Jam 17:47 WIB.

politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh di dekralasikan dalam rangka persiapan menghadapi pemilihan umum tahun 2004. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan perubahan nama dari Partai Keadilan (PK).[49]

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Kota Payakumbuh Periode pertama pada tahun 1999 sampai tahun 2005 yang di ketuai oleh Bapak H. Wardi Munir, SH sebagai ketua pertama DPD Partai Keadilan (PK) Kota Payakumbuh. Pada tahun 1999 Partai Keadilan (PK) Kota Payakumbuh mengikuti pemilihan umum pertama hanya satu orang yang menduduki perlemen, yaitu Bapak H. Wardi Munir, SH. Pada tahun 1999 ini partai PK tidak lolos *electoral treshold (ET)* yaitu ambang batas sebuah partai memperoleh suara untuk bisa ia ikut pemilihan umum pada periode berikutnya, karena Partai Keadilan (PK) tidak lolos pada tahun 1999 Partai Keadilan (PK) berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk pemilihan umum tahun 2004.

Pada periode kedua pada tahun 2005 sampai tahun 2010 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh di ketua oleh Bapak Tri Venindra, SE. Pada pemilihan umum tahun 2004 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat empat kursi di DPRD Kota Payakumbuh, yaitu sebagai berikut:

a. H. Wardi Munir, SH.

b. Hamdi Agus, ST.

[49]Wardi Munir, Kader PKS, Wawancara Pribadi, di Kantor DPD PKS Kota Payakumbuh, Tanggal 05 Oktoberr 2019 Jam 13:36 WIB.

c. Tri Venindra, SE.

d. Yohandriwati Syamsu, S.Sos.

Pada pemilihan umum tahun 2009 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan 3 kursi di DPRD Kota Payakumbuh, yaitu sebagai berikut:

a. Tri Venindra, SE dari daerah pilihan 1 Payakumbuh Barat.

b. Mustafa dari daerah pilihan 2 Payakumbuh Utara.

c. Nasrul dari daerah pilihan 3 Payakumbuh Timur.

Pada periode ketiga pada tahun 2010 sampai tahun 2015 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh di ganti dengan ketua Bapak H. Suparman, S.Pd. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh mengikuti pemilihan umum tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan 3 kursi lagi di DPRD Kota Payakumbuh, yaitu sebagai berikut:

a. H. Suparman, S.Pd. daerah pilihan 1 Payakumbuh Barat.

b. Heri Iswandi, SE. Dt. Rajo Mantiko Alam daerah pilihan 2 Payakumbuh Utara.

c. Nasrul dari daerah pilihan 3 Payakumbuh Timur.

Pada periode keempat tahun 2015 sampai tahun 2020 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh di ketua oleh Bapak Hamdi Agus, ST sampai sekarang. Dan pada pemilihan umum tahun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh 5 kursi di DPRD Kota Payakumbuh, yaitu sebagai berikut:

a. Hamdi Agus, ST. dari daerah pilihan 1 Payakumbuh Barat.

b. H. Suparman, S.Pd. dari daerah pilihan 1 Payakumbuh Barat.

c. Mustafa dari daerah pilihan 2 Payakumbuh Utara dan Lamposi Tigo Nagori.

d. Heri Iswandi, SE. Dt. Rajo Mantiko Alam dari daerah pilihan 2 Payakumbuh Utara dan Lamposi Tigo Nagori.

e. Nasrul dari daerah pilihan 3 Payakumbuh Timur.

Pada pemilihan umum tahun 2019 ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat perolehan suara terbanyak di Kota Payakumbuh. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat perigkat pertama di Sumatera Barat perolehan suara terbanyak dari partai-partai yang ada. Dari periode ke periode Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki kemajuan yang sangat bagus.[50]

2. Stuktur Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Kota Payakumbuh

Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Payakumbuh Periode 2010/2015

Ketua Umum : Suparman, S.Pd

Wakil Ketua Umum : Tri Venindra, SE

Sekretaris Umum : Hamdi Agus, ST

Wasekum 1 (Bidang Adm., Protokoler & RT, Inventaris) : Sugiarno

Wasekum 2 (Bidang Data, Inf, Arsip & Sejarah) : Andi Taufiq, ST

[50]Hamdi Agus, Ketua DPD PKS Kota Payakumbuh , Wawancara Pribadi, di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Tanggal 01 Oktoberr 2019 Jam 13:00 WIB.

Bendahara Umum : Edison

Bidang Kaderisasi

Ketua : Agus Gunawa

Bidang Pemuda, Kepanduan dan Olah Raga,GMPro

Ketua : Adek Fauzan,SH

Bagian Kepanduan dan pengamanan : Sumardi, Desni Dewita

Bagian Olah Raga dan kepeloporan pemuda : Afdhal Sakman, ST

Bidang Perempuan

Ketua : Erina

Bagian Kajian Perempuan, Anak dan

Ketahan Keluarga : Nurrahmi, S.Pd

:Yenni mutiara

Bagian Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan : Gina Erwita, S.Pd

: Mardayeti, S.Pt

Bidang Kebijakan Publik, Ekonomi Dan Sosial

Ketua : David Feri Andrio, S.Pt

Sekretaris : Indra Yusriadi

Bagian Advokasi Lembaga : Febri Oknali, SH,

Bagian Media dan komunikasi publik : Junaidi

Bagian Data, Informasi Jaringan dan Pengembangan Usaha : David Feri Andrio

Bagian Investasi dan Pembiayaan : Jon Kasman, Mayke, SE

Ketua-Ketua DPC

1. Payakumbuh Utara : Mustafa
2. Payakumbuh Timur : Nasrul
3. Payakumbuh Selatan : Pahlevi Putra, ST
4. Payakumbuh Barat : Yanto
5. Lampasi Tigo Nagari : Soni Sandra

Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Payakumbuh periode 2015/2020

Ketua Umum	: Hamdi Agus, ST
Wakil Ketua Umum	: Suparman, S.Pd
Sekretaris Umum	: Adek Fauzan,SH
Bendahara	: Ahlul Badrito Resha
Wakil Bendahara	: Edison
Bidang Kaderisasi	
Ketua	: Agus Gunawan
Anggota	: Andi Taufiq,ST
	: Nurrahmi,S.Si
	: Elfida
	: Erina
Bidang Kepemudaan	
Ketua	: Khairunnas
Anggota	: Farid Putera
	: Tito Anugerah,S.Kom

: Meta Purwandari,S.Pd

Bidang Perempuan

Ketua : Yohandriwati Syamsu,S.Sos

Anggota : Desni Dewita

: Yenni mutiara

Bidang Kesra

Ketua : Sugiarno

Anggota : Suci Maharani,S.Pt

Bidang Humas : Yudhi Andrianto,S.Pd

Bidang Pemenangan Pemilu

Ketua : Tri Venindra,SE

Anggota : Mustafa

Bidang Politik Hukum : Yanto

Bidang BKO

Ketua : Sumardi

Anggota : Memet

: Noviarti Nengsih

Ketua-Ketua DPC

1. Payakumbuh Utara : M. Manani
2. Payakumbuh Timur : Nasrul
3. Payakumbuh Selatan : Irwanto Dt Marajo Kayo
4. Payakumbuh Barat : Afrial

5. Lampasi Tigo Nagari : Hafif Junaidi[51]

3. Nama dan Lambang Partai Keadilan Sejahtera

Nama dari sebuah partai politik dan lambangnya pasti memiliki filosofis yang dalam. Nama ini dibuat bukan tanpa makna, namun keadilan merupakan sebuah *sunnah kauniyah* yang menjadi ciri alamiah. Menurut Nurcholish Madjid kata keadilan dalam Al–Qur'an disebut dengan *'adl* dan *qisth*. Dengan mengutip *salafus shalih*, kalangan Partai Keadilan mendefenisikan keadilan adalah meletakkan sesuatu di tempatnya tanpa melampoi batas, sebab yang melampoi batas itu desa dan perkotaan.

Keadailan merupakan salah satu konsep dan doktrin dalam politik Islam yang mengandung arti penegasan tentang kesatuan manusia yang diciptakan dari tanah. Dan juga mengandung makna, membuka jalan bagi nilai-nilai kebenaran, kebaikan keindahan, dan kebahagian hidup. Yang mana dalam politik modern makna adil ('adl) terkait erat dengan seimbang dan menengah dalam semangat moderasi dan toleransi, yang dinyatakan dengan istilah *wasath* (pertengahan) yang mana sikap yang seimbang antara dua ekremitas serta realistis dalam memahami tabiat dan kemungkinan manusia untuk menolok baik kemewahan maupun semua berlebihan.

Keadilan sebagai syarat pokok bagi semua bentuk pemerintahan yang sah. Yang mana pemerintahan hasil dari pemilihan umum yang jujur, adil, dan demokratis, merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Lambang atau tanda gambar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jika dibandingkan dengan

[51]Data Kantor DPD PKS Kota Payakumbuh. Hari Jum'at, Tanggal, 13 September 2019 Jam 08:30 WIB.

partai Islam lainnya sangat menonjol sekali berbedaannya. Uniknya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menggunakan simbol bulan sabit dan bintang sebagai identifikasi dari partai Islam. Yang mana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampil dengan identitas tersendiri pula.[52]

Yang mana dibawah ini di jelaskan secara rinci arti dari lambang Partai Keadilan Sejahtera, yaitu sebagai berikut:

Lambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS)



Gambar dua bulan sabit dengan untaian padi tegak lurus ditengah berwarna kuning emas dalam perisai segi empat persegi panjang berwarna hitam bergambar Ka'bah. Dibagian atas terlukis PARTAI KEADILAN dan bagian dalam kotak Ka'bah tertulis SEJAHTERA berwana kuning emas.

1) Arti gambar:
   a. Kotak persegi empat maknanya kesetaraan, keteraturan, keserasian;
   b. Ka'bah maknaya kesatuan umat;
   c. Bulan sabit maknaya kemenangan Islam, keindahan, kebahagiaan, pencerahan;

[52]Aay Muhamad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera Ideologi Dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Teraju, 2004), hal. 155

d. Untaian padi tegak lurus maknanya keadilan, ukhuwah, istiqamah, kesejahteraan.

2) Arti warna:

a. Putih maknanya bersih dan kesucian;

b. Hitam maknanya aspiratif dan kepastian;

c. Kuning emas maknanya kecermelangan, kegembiraan, kejayaan.

3) Makna secara umum:

"Menegakkan nilai-nilai keadilan berlandaskan pada kebenaran, persaudaraan, dan persatuan menuju kesejahteraan umat dan bangsa".[53]

4. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

a. Visi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

"Menjadikan partai dakwah yang kokoh dalam berkhidmat untuk umat, bangsa, dan negara".

b. Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

1) Memperkokoh jati diri partai kader yang berkarakter bersih, peduli dan profesional.

2) Memperkokoh Good Party Governance melalui Sistem Manajemen Partai Dakwah (SMPD).

3) Menjadikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai pelopor dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan rakyat.

4) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi kontributor peradaban.[54]

---

[53]Tim Divora Yugha E, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*, (Jakarta: Erlangga, 2014). Hal. 76

[54]Http://www.dakta.com/ news/ 3244/ mukernas-kokohkan-empat-misi-pks-2015-2010. hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 Jam 08:35 WIB

B. Capaian Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera di Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Legislatif

Pada pemilihan umum tahun 2004, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh meraih pencapaian sebanyak 7. 273 suara di DPR Republik Indonesia, 8.1963 suara di DPRD Provinsi dan 7.345 suara di DPRD Kota . Pada tahun 2009 Partai Keadilan Sejahtera di kota Payakumbuh turun perolehan suara menjadi 1. 048 suara di DPR Republik Indonesia, di DPRD Provunsi 1. 275 suara dan 1.195 suara di DPRD Kota. Pada tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil menaikkan perolehan suara sebanyak 9.867 suara di DPR Republik Indonesia, di DPRD Provunsi 8.446 suara dan 7.457 suara di DPRD Kota. Sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

1. Capaian perolehan suara DPR RI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilihan umum Legislatif di Kota Payakumbuh

No	Tahun	Perolehan Suara
		DPR RI
1.	2004	7. 273
2.	2009	1. 048
3.	2014	9.867
4.	2019	19.281

Pada tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tahun 2009 menurun drastis dari 7.273 suara pada tahun 2004 menjadi 1.048 suara. Ini menyebabkan pengurus Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) dan para kader-kader berusaha keras meyakinkan bahwa PKS adalah partai dakwa dan meningkatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk pemilihan umum periode selanjutnya. Pada pemilihan umum tahun 2014 perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh naik hingga 90 % yaitu dengan jumlah perolehan suara 9.867 suara. Pada tahun 2019 perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) naik hingga dua kali lipat dari pemilihan umum sebelumnya, yaitu sebanyak 19.281suara.

2. Capaian perolehan suara DPRD Provinsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilihan umum Legislatif di Kota Payakumbuh

NO	TAHUN	PEROLEHAN SUARA
		DPRD Provinsi
1.	2004	8. 192
2.	2009	1. 275
3.	2014	8.446
4.	2019	17.416

Pada tabel diatas dapat disimpulan bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilihan umum DPRD Provinsi turun pada tahun 2009. Pada tahun 2014 dan tahun 2019 perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) naik hingga 50 % (Lima Puluh Persen) dari pemilihann umum sebelumnya. Ini sebagai kebanggaan bagi Partai Keadilan Sejahtertera.

3. Capaian perolehan suara DPRD Keb/Kota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilihan umum Legislatif di Kota Payakumbuh[55]

[55]Data dari kantor KPU Kota Payakumbuh, Hari Jum'at, Tanggal 26 Mai 2019 Jam 11:07 WIB

No	Tahun	Perolehan Suara			
		DPRD Keb/Kota			
		Pyk. Barat	Pyk. Utara dan Lamposi Tigo Nagori	Pyk.Timur dan Pyk. Selatan	Jumlah
1.	2004	3.350	2.798	1.197	7. 345
2.	2009	391	515	289	1.195
3.	2014	2.205	2.937	2.315	7.457
4.	2019	5.929	4.534	3.370	13.833

Pada tabel diatas telah dijelaskan bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara rinci. Bahwa pada tahun 2019 perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) naik dari pemilihan umum sebelumnya. Yang mana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh pada pemilihan umum pada tahun 2019 ini meraih suara terbanyak Sekota Payakumbuh bahkan Sesumatera Barat.

C. Strategi Yang Digunakan PKS Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh

Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan dapat menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari peneliti dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui strategi yang digunakan PKS dalam pemilihan umum Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh. Dalam wawancara ini penulis memberikan beberapa pertanyan kepada informen yang berasal dari beberapa pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh dan beberapa para kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

di Kota Payakumbuh.

Dari beberapa strata pengurus dan kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwawancarai penulis juga memberikan beberapa pertanyaan yang sama, namun tidak semua informan bisa menjawab seluruh pertanyaan yang berkenan dengan strategi yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemilihan umum Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh tersebut, karena dapat dikatakan pertanyaan yang bersifat khusus tentu yang dapat menjawabnya ialah informan-informan yang memang ahli dalam bidang itu. Jadi yang tidak dapat dijawab oleh informan sebelumnya, maka pertanyaan tersebut ditanyakan lagi ke informan selanjutnya sampai pertanyaan tersebut terjawab secara rinci dan jelas. Dengan menggunakan cara demikian penulis menganggap seluruh pertanyaan yang akan penulis tanyakan dapat terjawab oleh informan secara jelas dan lengkap sesuai yang di inginkan penulis.

Pertanyaan pertama yang penulis tanyakan, apasaja bentuk-bentuk strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019. Pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh mendefenisikan bentuk-bentuk strategi PKS di Kota Payakumbuh, ialah sebagai berikut:

a. Memilih calon Legislatif potensial dari berbagai segmen masyarakat.
b. Memberikan pendidikan politik dengan cara adanya program Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Undang-Undang perlindungan Ulama, Undang-Undang pajak motor gratis dan SIM seumur hidup).
c. Adanya metode kampanye *Flas Mob* (aksi bersama turun kejalan).

d. Direct Selling.[56]

Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah berbuat untuk masyarakat, dan melakukan kampanye.[57] Pendapat lain mengatakan strategi Partai Keadilan Sejahtera, adalah sebagai berikut:

a. Pembentukan kader yang di tokohkan menjadi anggota Legislatif, maksudnya yaitu ketika partai ini mengkader dulu yang siap untuk menjadi pejabat Legislatif mau pun Eksekutif.
b. Pemetaan partai politik.
c. Melakukan komunikasi dan pendekatan para tokoh-tokoh masyarakat.[58]

Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilihan umum tahun 2019 Legislatif, adalah sebagai berikut:

a. Direct selling ini ciri khas turun ke masyarakat atau bersosialisasi.
b. Flas Mob (timbal balik)

   Karena suatu hal unik dan tidak di lakukan oleh partai-partai lain. *Flas Mob* ini dilakukan dari pusat sampai kedaerah yang mana selama kampanye beberapa kali kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turun kejalan, dan ke pasar-pasar atau pusat keramaian.[59]

Pendapat lain mengatakan strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah pelayanan lebih untuk rakyat, dan bantuan untuk para bencana yang

[56]Adek Fauzan, Sekretaris DPD PKS Kota Payakumbuh, Wawancara Pribadi, di Kantor DPD PKS Kota Payakumbuh, Tanggal 23 September 2019 Jam 11:30 WIB

[57]Sugiarno, Katua Bidang Kesra DPD PKS Kota Payakumbuh, Wawancara Pribadi, di Kantor DPD PKS Kota Payakumbuh, Tanggal 19 September 2019 Jam 09:00 WIB

[58]Yudhi Andrianto,..., Tanggal 28 September 2019 Jam 17:47 WIB

[59]Khairunnas, Ketua Bidang Kepemudaan DPD PKS Kota Payakumbuh, Wawancara Pribadi, di Kantor DPD PKS Kota Payakumbuh, Tanggal 11 September 2019 Jam 16:35 WIB

terjadi di Indonesia.[60] Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh pada pemilihan umum tahun 2019 terbagi atas beberapa, yaitu sebagai berikut:

a. Pencalekan terbagi atas beberapa yaitu sebagai berikut:
   1. Mencalonkan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang potensial dalam fasilitas untuk kemenangan pemilihan umum dan tidak semua calon Legislatif berasal dari kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
   2. Melibatkan tokoh masyarakat maksudnya kita seleksi dan kita lihat siapa-siapa saja tokoh masyarakat yang bisa dicalonkan sebagai calon Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

b. Kampanye terbagi juga atas beberapa, yaitu sebagai berikut:
   1. Ada konsep yang diterapkan ke masyarakat secara nasional antara lain konsepnya, yaitu:
      a) Undang-Undang ulama, tokoh ulama, dan simbol-simbol masyarakat.
      b) Untuk kendaraan bermotor 125 CC rendah di hapuskan pajak tahunnya.
      c) Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup.
      d) Bagi masyarakat yang penghasilan delapan juta kebawah tidak di kenakan pajak penghasilan.
      e) Setiap Calon Legislatif di bagi daerah basis (fokus daerah/daerah khusus).
      f) Mengangkat tema semangat umat Islam.[61]

      Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh pada

[60]Tri Venindra, Kader PKS Kota Payakumbuh, Wawancara Pribadi, di rumah, Tanggal 16 September 2019 Jam 09:42 WIB.

[61]Hamdi Agus,..., Tanggal 01 Oktober 2019 Jam 13:00 WIB

pemilihan umum tahun 2019, yaitu *pertama*, dekat dengan Alllah dan masyarakat, *kedua,* dengarkan suara masyarakat dan keluhan masyarakat dengan itu kita dapat bantu masyarakat, dan *ketiga, Flash Mob* (aksi bersama turun ke masyarakat).[62] Pendapat lain mengatakan strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh pada pemilihan umum tahun 2019 terbagi atas beberapa, yaitu sebagai berikut:

a. Konsolidasi struktural secara berkala mempercepat rekrutmen tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat lainnya sebagai CAD (Calon Anggota Dewan).
b. Membangun *opini* publik tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai pro rakyat kecil melalui kegiatan *Flash Mob* secara massif di jalan-jalan raya.
c. Mengangkat tema kampanye yang rasional, dan aplikatif, yaitu janji menghapuskan pajak kendaraan bermotor dengan CC kecil dan SIM (Surat Izin Mengemudi) berlaku seumur hidup.
d. Pemberdayaan CAD (Calon Anggota Dewan) dari kalangan milanial dalam meruap potensi suara pemilih pemula.[63]

Beberapa pendapat para informan yang telah dipaparkan di atas dapat di pahami bahwa bentuk-bentuk strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

[62]Yohandriwati Syamsu, Ketua Bidang Perempuan DPD PKS Kota Payakumbuh, Wawancara Pribadi, di Kantor SD IT Mutiara Hati Payakumbuh, Tanggal 03 Oktoberr 2019 Jam 11:58 WIB

[63]Wardi Munir,..., Tanggal 05 Oktoberr 2019 Jam 13:36 WIB

a. Memilih calon Legislatif potensial dari berbagai segmen masyarakat.
b. Memberikan pendidikan politik dengan cara adanya program Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Undang-Undang perlindungan Ulama, Undang-Undang pajak motor gratis dan SIM seumur hidup).
c. Adanya metode kampanye *Flas Mob* (aksi bersama turun kejalan-jalan raya, dan pusat keramaian, seperti pasar).
d. Direct Selling ini merupakan ciri khas turun kemasyarakat atau bersosialisasi langsung dengan masyarakat tersebut.
e. Kominikasi dan pendekatan tokoh-tokoh masyarakat.
f. Mengangkat tema kampanye yang rasional, dan aplikatif, yaitu janji menghapuskan pajak kendaraan bermotor dengan CC kecil dan SIM (Surat Izin Mengemudi) berlaku seumur hidup.

Pertanyaan kedua yang penulis tanyakan, Apa alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan strategi politik ini pada tahun 2019. Alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan strategi politik ini pada tahun 2019, ialah untuk menyebarkan dakwa-dakwa kemasyarakat atau nilai-nilai kebaikan melalui jabatan Legislatif.[64] Penjelasan lain menjelaskan bahwa alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan strategi politik ini pada tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

a. Masyarakat perlu diberikan pendidikan politik, sehingga dapat memilih dengan rasional.

[64]Yudhi Andrianto,..., Tanggal 28 September 2019 Jam 17:47 WIB

b. Perlu ada hubungan emosional terjalin dengan para pemilih atau kostituen.[65]

Kemudian Penjelasan lain menjelaskan bahwa alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan strategi politik ini pada tahun 2019, ialah berdasarkan hasil servey bahwa moyoritas pemilih di Kota Payakumbuh adalah pemilih emosional. Maka calon Legislatif yang berlatar belakang tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda lebih muda medulang suara. Hal ini tidak mengabaikan nilai-nilai primordial yang sudah lumrah ditengah-tengah masyarakat.[66] Penjelasan lain menjawab bahwa alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan strategi politik ini pada tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

a. Dengan strategi *Direct Selling* kita bisa langsung menyapa masyarakat, mendengarkan curhatan masyarakat langsung dan bisa mengetahui kemana pilihan masyarakat sekaligus mengenalkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di masyarakat.
b. Dengan cara *Flas Mob* ini secara otomatis orang dijalan melihat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena *Flas Mob* ini menampilkan berbagai macam atrebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan menjadi pusat perhatian di tengah-tengah masyarakat.[67]

Penjelasan lain menjawab bahwa alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan strategi politik ini pada tahun 2019, ialah kita butuh suara rakyat karna itu kita merakyat.[68] Kemudian Penjelasan lain menjelaskan bahwa

[65]Adek Fauzan,..., Tanggal 23 September 2019 Jam 11:30 WIB
[66]Wardi Munir,..., Tanggal 05 Oktober 2019 Jam 13:36 WIB
[67]Khairunnas,..., Tanggal 11 September 2019 Jam 16:35 WIB
[68]Tri Venindra,..., Tanggal 16 September 2019 Jam 09:42 WIB

alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan strategi politik ini pada tahun 2019, yaitu untuk menyebarkan kebaikan atau berdakwa "Ayo Lebih Baik".[69] Penjelasan lain menjawab bahwa alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan strategi politik ini pada tahun 2019, yaitu cara yang tepat untuk menambah suara. Contohnya Untuk kendaraan bermotor 125 CC rendah di hapuskan pajak tahunnya, Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup, bagi masyarakat yang penghasilan delapan juta kebawah tidak di kenakan pajak penghasilan dan setiap Calon Legislatif di bagi daerah basis (fokus daerah/daerah khusus).[70]

Alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan strategi politik ini pada tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

a. Memenangkan pemilihan umum
b. Ada upaya hukum setiap Undang-Undang.[71]

Dari berbagai penjelasan dari informan di atas dapat di simpullkan bahwa alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan strategi politik ini pada tahun 2019 pada pemilihan umum Legislatif, yaitu sebagai berikut:

a. Masyarakat perlu diberikan pendidikan politik, sehingga dapat memilih dengan rasional.
b. Karena bisa langsung menyapa masyarakat atau bersosialisasi dengan masyarakat itu sendiri.
c. Adanya upaya hukum setiap Undang-Undang partai politik.
d. Untuk memenangkan pemilihan umum dengan perolehan suara.

[69]Yohandriwati Syamsu,..., Tanggal 03 Oktoberr 2019 Jam 11:58 WIB
[70]Hamdi Agus,..., Tanggal 01 Oktober 2019 Jam 13:00 WIB
[71]Sugiarno,..., Tanggal 19 September 2019 Jam 09:00 WIB

Pertanyaan ketiga penulis yang tanyakan, sejak kapan strategi ini terapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh. Strategi ini terapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh, ialah sejak partai ini berdiri dan telah menjadi ciri khas dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).[72] Jawaban lain, strategi *Direct Selling* sejak tahun 2004 dan strategi *Flash Mob* sejak tahun 2019 atau pada pemilihan umum tahun 2019.[73] Jawaban yang lain, sejak tahapan pemilihan umum ini di mulai (1998).[74] Jawaban lain mengatakan, sejak berdirinya sejak tahun 1999 yaitu Partai Keadilan (PK) dan berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).[75]

Jawaban lain, ialah strategi politik Partai Politik Sejahtera (PKS) dalam bentuk *Direct Selling (DS)* dengan memberikan jumlah target kunjungan kerumah-rumah masyarakat calon pemilih merupakan kebijakan Nasional dari DPD PKS, artinya program dan strategi seperti ini rata-rata di terapkan di semua daerah. Prinsip yang di terapkan Partai Keadialan Sejahtera (PKS) tidak boleh menyampaikan janji kosong, tidak menawarkan imbalan, tidak boleh black champaing (kampanye hitam), tidak boleh maney politic dan juga tidak boleh one man shaw dalam berkampanye.[76]

Dari berbagai penjelasan dari informan sejak kapan strategi politik ini di terapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh, ialah strategi *Direct Selling* sejak tahun 2004 dan strategi *Flash Mob* sejak tahun 2019 atau pada pemilihan tahun 2019.

---

[72]Khairunnas,..., Tanggal 11 September 2019 Jam 16:35 WIB
[73]Adek Fauzan,..., Tanggal 23 September 2019 Jam 11:30 WIB
[74]Hamdi Agus,..., Tanggal 01 Oktober 2019 Jam 13:00 WIB
[75]Sugiarno,..., Tanggal 19 September 2019 Jam 09:00 WIB
[76]Wardi Munir,..., Tanggal 05 Oktoberr 2019 Jam 13:36 WIB

Pertanyaan keempat yang penulis tanyakan, dimana saja model strategi politik ini di terapkan. Adapun jawaban dari informan, yaitu dari pusat sampai ke daerah esensinya prinsip dasar sama tapi yang membedakan kearifan lokal.[77] Jawaban lain, yaitu disetiap kelurahan dan di pusat keramaian.[78] Jawaban informan lain, yaitu seluruh Indonesia teknis penyampaiannya yang hanya berbeda maksudnya cara pendekatannya bukan mani politic.[79] Jawaban yang lain, yaitu di seluruh tempat di Indonesia dan terstuktur dari pusat.[80]

Dari jawaban yang telah di paparkan di atas oleh informen dapat di pahami bahwa model strategi politik ini di terapkan, ialah seluruh Indonesia tapi hanya teknis penyampaiannya berbeda maksudnya cara pendekatannya bukan mani politic dan prinsip dasar sama tapi yang membedakan kearifan lokal.

Pertanyaan kelima yang penulis tanyakan, bagaimana perbedaan politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan partai politik lainnya. Adapun jawaban dari informan, yaitu sebagai berikut:

a. Adanya kegiatan kampanye bentuk lain (Flash Mob, dan lain-lain).
b. Adanya gagasan atau ide untuk membuat Undang-Undang yang di butuhkan oleh masyarakaat.[81]

Adapun jawaban lain, perbedaan tidak jauh beda dengan partai lain, tapi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) spasifiknya di bidang dakwah atau berasaskan

[77]Yohandriwati Syamsu,..., Tanggal 03 Oktoberr 2019 Jam 11:58 WIB.
[78]Khairunnas,..., Tanggal 11 September 2019 Jam 16:35 WIB
[79]Yudhi Andrianto,..., Tanggal 28 September 2019 Jam 17:47 WIB
[80]Sugiarno,..., Tanggal 19 September 2019 Jam 09:00 WIB
[81]Adek Fauzan,..., Tanggal 23 September 2019 Jam 11:30 WIB

Islam.[82] Jawaban lain, ialah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dakwah tapi asasnya yang berbeda.[83] Jawaban yang lain dari informan, yaitu jual konsep dan isu yang jelas dan partai lain belum tentu ada.[84]

Dari beberapa paparan jawaban dari informan dapat di simpulkan perbedaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan partai lainnya, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai dakwa berasaskan Islam dan belum tentu di miliki oleh partai lain, dan partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ada kegiatan kampanye yang berbentuk *Flash Mob* dan *Direct Selling* yang belum tentu di miliki oleh partai politik lain.

Pertanyaan yang keenam yang di tanyakan, mengapa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan strategi politik ini. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan strategi ini karena untuk merebut suara, perintah Allah dan agama.[85] Jawaban lain, yaitu karena masyarakat tidak semua betuh sentuhan politik atau janji-janji kampanye dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menampakkan ciri khasnya.[86] Jawaban informen lain karena lebih dekat dengan masyarakat, bisa meyakinkan masyarakat, dan calon-calon Legislatif juga terjun ke masyarakat.[87]

Berdasarkan paparan jawaban yang di peroleh dari informan diatas dapat di pahami bahwasanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan strategi ini karena untuk merebut suara dan memenengkkan pemilihan umum

[82]Sugiarno,..., Tanggal 19 September 2019 Jam 09:00 WIB
[83]Yudhi Andrianto,..., Tanggal 28 September 2019 Jam 17:47 WIB
[83] Sugiarno,..., Tanggal 19 September 2019 Jam 09:00 WIB
[84]Hamdi Agus,..., Tanggal 01 Oktoberr 2019 Jam 13:00 WIB
[85]Tri Venindra,..., Tanggal 16 September 2019 Jam 09:42 WIB
[86]Sugiarno,..., Tanggal 19 September 2019 Jam 09:00 WIB
[87]Khairunnas,..., Tanggal 11 September 2019 Jam 16:35 WIB

pada tahun 2019 ini.

Pertanyaan yang ketujuh yang ditanyakan, apa keunggulan dan kelemahan strategi politik ini. Keunggulan dari politik ini, yaitu strategi direct selling (DS) dengan bersilaturrahmi kerumah-rumah tetangga dan masyarakat dapat di jadikan media untuk menyampaikan visi misi.[88] Jawaban lain, ialah sebagai berikut:

a. Keunggulan
    1. Seluruh calon legislatif dibekali dan diberikan pemahaman ide untuk di berikan ke masyarakat.
    2. Bisa menyampaikan program partai ke masyarakat.
b. Kelemahannya adalah janji politik susah untuk di wujudkan.[89]

Jawaban lain yang di paparkan informen, yaitu sebagai berikut:

a. Keunggulan
    1. Tatap muka dengan masyarakat.
    2. Lebih mengenal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
    3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak hanya hadir di pemilihan umum saja tapi setiap sangat.
    4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menggunakan mani politic.
b. Kelemaham
    1. Banyak berkorban waktu.
    2. Butuh banyak sumber daya manusia dan waktu untuk melakukan kampanye tersebut.

[88]Wardi Munir,..., Tanggal 05 Oktoberr 2019 Jam 13:36 WIB
[89]Hamdi Agus,..., Tanggal 01 Oktoberr 2019 Jam 13:00 WIB

3. Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai dakwa.[90]

Dari paparan jawaban di atas dapat di simpulkan keunggulan dan kelemahan dari strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh pada pemilihan umum tahun 2019, yaitu:

a. Keunggulannya:
   1. Media untuk menyampaikan visi misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
   2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mengenal mani politic.
   3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak hanya hadir dalam pemilihan umum atau kampanye saja tapi setiap sangat.
   4. Seluruh calon Legislatif di bekali dan di berikan pemahaman ide untuk di berikan ke masyarakat.
b. Kelemahannya:
   1. Banyak mengorbankan waktu untuk terjun kemasyarakat.
   2. Janji politik susah untuk di wujudkan.
   3. Butuh banyak sumber daya manusia untuk melakukan kampanye tersebut.

Pertanyaan yang kedelapan yang ditanyakan, berapa kursi yang di peroleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif tahun 2019. Jawaban dari informan DPRD Kota Payakumbuh mendapatkan 5 kursi dengan nama-nam sebagai berikut:

a. Hamdi Agus, ST. daerah pilihan 1 Payakumbuh Barat.

[90]Khairunnas,..., Tanggal 11 September 2019 Jam 16:35 WIB

b. H. Suparman, S.Pd. daerah pilihan 1 Payakumbuh Barat.
c. Mustafa dari daerah pilihan 2 Payakumbuh Utara dan Lamposi Tigo Nagori.
d. Heri Iswandi, SE. Dt. Rajo Mantiko Alam. daerah pilihan 2 Payakumbuh Utara Lamposi Tigo Nagori.
e. Nasrul dari daerah pilihan 3 Payakumbuh Timur.[91]

Pertanyaan yang kesembilan yang ditanyakan, Apasaja hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menerapkan strategi politik pada Pemilihan umum Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh. Hambatan-hambatannya, ialah keterbatasan kader dan keterbatasan dana karena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menjadikan uang sebagai strategi politik.[92] Jawaban lain hambatan-hambatannya terbagi 2, yaitu sebagai berikut:

a. Hambatan-hambatan Internal
    1. Jumlah kader yang terbatas;
    2. Kemampuan finansial partai yang minim
    3. Kekhawatiran terjebak kepada janji politik;
    4. Dukungan keluarga;
    5. Minim pengalaman bagi calon Legislatif pemula.
b. Hambatan-hambatan Eksternal
    1. Persepsi masyarakat yang sudah terpolarisasi dengan budaya politik pragmatis;
    2. Budaya money politic masih mewabah di tengah-tengah masyarakat;

[91]Hamdi Agus,..., Tanggal 01 Oktoberr 2019 Jam 13:00 WIB
[92]Tri Venindra,..., Tanggal 16 September 2019 Jam 09:42 WIB

3. Ancaman “serangan fajar” yang sering merubah pilihan masyarakat menengah kebawah;
4. Informasi tentang regulasi sistem pemilihan umum tidak terdistribusi secara merata ke masyarakat;
5. Kecurangan dalam penghitungan suara.[93]

Jawaban lain menyatakan hambatan-hambatan dari strategi politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah adanya perbedaan pemahaman aturan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan partai politik dan sumber daya manusia yang masih terbatas.[94] Informan lain mengatakan hambata-hambatannya, ialah latar belakang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang beragam dan mengatur waktu strategi *Direct Selling* dan *Flash Mob*.[95] Jawaban lain tentang hambatan-hambatan politik ini, ialah tuntutan finansial tidak dapat di ungkiri dan keuangan sangat minim.[96]

Pertanyaan yang kesepuluh yang ditanyakan, kenapa hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menerapkan strategi politik pada pemilihan umum Legislatif tahun 2019 di Kota Payakumbuh. Informan mengatakan di sebab karena kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai latar belakang masing-masing atau kesibukan masing-masing.[97] Jawaban lain, yaitu karena beda pemikiran di sebabkan banyak yang belum memahami konteks dakwah, masyarakat kurang kesadaran atas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai dakwah yang berasaskan Islam dan tidak boleh

[93]Wardi Munir,..., Tanggal 05 Oktoberr 2019 Jam 13:36 WIB
[94]Adek Fauzan,..., Tanggal 23 September 2019 Jam 11:30
[95]Khairunnas,..., Tanggal 11 September 2019 Jam 16:35 WIB
[96]Sugiarno,..., Tanggal 19 September 2019 Jam 09:00 WIB
[97]Khairunnas,..., Tanggal 11 September 2019 Jam 16:35 WIB

menggunakan uang.[98]

Jawaban informen lain menjelaskan bahwa hambatan-hambatan terjadi karena aturan sistem pemilihan umum kita tidak berlaku permanen, sehingga regulasi yang di terbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah sering tumbang tindih.[99]

Berdasarkan jawaban yang di peroleh dari informen diatas dapat di pahami bahwasanya hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penerapan strategi politik pada Pemilihan Umum Legislatif 2019, ialah sebagai berikut:

1. Keterbatasan dana karena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menjadikan uang sebagai strategi politik *"maney politic".*
2. Kecurangan dalam penghitungan suara.
3. Jumlah kader yang terbatas menyebabkan susahnya untuk menjalankan berbagai strategi-strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
4. Kemampuan finansial partai yang minim.
5. Ancaman "serangan fajar" yang sering merubah pilihan dan masyarakat menengah kebawah.
6. Adanya perbedaan pemahaman aturan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan partai.

Terjadinya hambatan ini di sebabkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menjadikan uang sebagai strategi politik karena itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kekurangan dana atau minimnya dana, Minim pengalaman

[98]Yudhi Andrianto,..., Tanggal 28 September 2019 Jam 17:47 WIB
[99]Wardi Munir,..., Tanggal 05 Oktoberr 2019 Jam 13:36 WIB

bagi calon Legislatif pemula dengan minnimnya pengetahuan para calon Legislatif pemula menyebabkan susah berkampanye di tengah-tengah masyarakat.

D. Analisis Penulis Terhadap Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh

1. Analisis Penulis terhadap bentuk-bentuk strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara pribadi yang penulis lakukan di Kota Payakumbuh dapat di analisis bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai Islam yang ada di Indonesia sudah menjalankan fungsinya sebagai partai politik. Bentuk-bentuk strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019, yaitu:

a. Pencalekan terbagi atas beberapa yaitu sebagai berikut:
   1) Mencalonkan kader PKS yang potensial dalam fasilitas untuk kemenangan pemilihan umum dan tidak semua calon Legislatif berasal dari kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
   2) Melibatkan tokoh masyarakat maksudnya kita seleksi dan kita lihat siapa-siapa saja tokoh masyarakat yang bisa dicalonkan sebagai calon Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

b. Kampanye terbagi juga atas beberapa, yaitu sebagai berikut:
   1) Ada konsep yang di terapkan ke masyarakat secara nasional antara lain konsepnya, yaitu:

a) Undang-Undang ulama, tokoh ulama, dan simbol-simbol masyarakat.
b) Untuk kendaraan bermotor 125 CC rendah di hapuskan pajak tahunnya.
c) Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup.
d) Bagi masyarakat yang penghasilan delapan juta kebawah tidak dikenakan pajak penghasilan.
e) Setiap Calon Legislatif di bagi daerah basis (fokus daerah/daerah khusus).
f) Mengangkat tema semangat umat Islam.
g) Adanya kampanye *Flas Mob* yaitu aksi bersama turun kejalan-jalan raya, dan pusat keramaian.
h) Direct Selling.[100]

Dari penjelasan tersebut dapat di analisis penulis bahwa strategi suatu partai menentukan perolehan suara. Dengan melakukan strategi *Flas Mob* ini secara otomatis orang mengetahui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena strategi *Flas Mob* ini turun kejalan-jalan raya, pusat keramaian seperti pasar dan menampilkan bermacam-macam atrebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Strategi politik Partai Politik Sejahtera (PKS) dalam bentuk *Direct Selling (DS)* dengan memberikan jumlah target kunjungan kerumah-rumah masyarakat calon pemilih merupakan kebijakan Nasional dari DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS), artinya program dan strategi seperti ini rata-rata di terapkan di semua daerah. Prinsip yang di terapkan Partai Keadialan Sejahtera (PKS) tidak boleh menyampaikan janji kosong, tidak menawarkan imbalan, tidak boleh

[100]Hamdi Agus,..., Tanggal 01 Oktoberr 2019 Jam 13:00 WIB

black champaing (kampanye hitam), tidak boleh maney politic dan juga tidak boleh one man shaw dalam berkampanye. Stategi *Direct Selling (DS)* ini baru di terapkan pada pemilihan umum tahun 2019 ini.

Menyebarkan isu-isu yang menarik ke masyarakat itu dapat meningkatkan perolehan suara, yang mana pada tahun 2019 ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan perolehan suara terbanyak di Kota Payakumbuh dengan kursi 5 di DPRD Kota Payakumbuh.

2. Hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penerapan strategi politik pada Pemilihan Umum Legislatif 2019, ialah sebagai berikut:

a. Hambatan-hambatan Internal

1) Jumlah kader yang terbatas;
2) Kemampuan finansial partai yang minim;
3) Kekhawatiran terjebak kepada janji politik;
4) Dukungan keluarga;
5) Minim pengalaman bagi calon Legislatif pemula.

b. Hambatan-hambatan Eksternal

1. Persepsi masyarakat yang sudah terpolarisasi dengan budaya politik pragmatis;
2. Budaya money politic masih mewabah di tengah-tengah masyarakat;
3. Ancaman “serangan fajar” yang sering merubah pilihan masyarakat menengah kebawah;
4. Informasi tentang regulasi sistem pemilihan umum tidak terdistribusi secara merata ke masyarakat;

5. Kecurangan dalam penghitungan suara.[101]

Dari penjelasan tersebut dapat di analisis penulis bahwa hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menerapkan strategi politik pada pemilihan umum Legislatif tahun 2019 yang mana ancaman "serangan fajar" yang sering merubah pilihan masyarakat menengah kebawah disebabkan karena faktor ekonomi masyarakat yang kurang memadani menyebabkan masyarakat menengah kebawah memilih jalan tersebut. Dengan kecurangan penghitungan suara itu dapat merugikan suatu partai yang mana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menggunakan uang sebagai kampanye untuk memberoleh suara.

Terjadinya hambatan ini di sebabkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menjadikan uang sebagai strategi politik karena itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kekurangan dana atau minimnya dana, Minim pengalaman bagi calon Legislatif pemula dengan minimnya pengetahuan para calon Legislatif pemula menyebabkan susah berkampanye di tengah-tengah masyarakat dan aturan sistem pemilihan umum kita tidak berlaku permanen, sehingga regulasi yang di terbitkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan pemerintah sering tumbang tindih. Hal ini menyebabkan partai politik kesulitan dalam melakukan kampanye bahkan ada yang meraba-raba dalam menerapkan dstrategi politik dalam merebut kemenangan.

[101]Wardi Munir,..., Tanggal 05 Oktoberr 2019 Jam 13:36 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan penjelasan yang telah di bahas dalam bab-bab yang sebelumnya, maka penulis mengambil dan menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019, yaitu sebagai berikut:
   a. Memilih calon Legislatif potensial dari berbagai segmen masyarakat.
   b. Memberikan pendidikan politik dengan cara adanya program Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
   c. Adanya metode kampanye *Flas Mob* (aksi bersama turun kejalan-jalan raya, dan pusat keramaian, seperti pasar).
   d. *Direct Selling* ini merupakan ciri khas turun kemasyarakat atau bersosialisasi langsung dengan masyarakat tersebut.
   e. Kominikasi dan pendekatan tokoh-tokoh masyarakat.
   f. Mengangkat tema kampanye yang rasional dan aplikatif, yaitu janji menghapuskan pajak kendaraan bermotor dengan CC kecil dan SIM (Surat Izin Mengemudi) berlaku seumur hidup.
2. Hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penerapan strategi politik pada Pemilihan Umum Legislatif 2019, ialah sebagai berikut:

7. Kemampuan finansial partai yang minim.
8. Jumlah kader yang terbatas menyebabkan susahnya untuk menjalankan berbagai strategi-strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
9. Ancaman "serangan fajar" yang sering merubah pilihan masyarakat menengah kebawah.
10. Adanya perbedaan pemahaman aturan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan partai.

Terjadinya hambatan ini di sebabkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menjadikan uang sebagai strategi politik karena itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kekurangan dana atau minimnya dana, Minim pengalaman bagi calon Legislatif pemula dengan minnimnya pengetahuan para calon Legislatif pemula menyebabkan susah berkampanye di tengah-tengah masyarakat.

B. Saran-saran

Dengan kondisi yang tampak dari hasil penelitian ini, maka penulis memiliki saran yang cukup bermanfaat bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diantaranya:

1. Kepada pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh disarankan harus membuat Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Kepada pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh sisarankan harus lebih merakyat.

3. Kepada para kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh harus berusaha keras meyakinkan masyarakat bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai dakwa yang berasaskan Islam.
4. Kepada pengurus dan kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh bahwa janji-janji politik paska pemilihan umum sebaiknya di wujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, Alfan. 2008. *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: Gremedia Pustaka Utama.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta. Edisi Revisi V.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta. Cet-2.

Asikin, Amiruddin Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.

Azizy, A. Qodri A. dkk. 2004. *Jejak-Jejak Islam Politik*. Jakarta: Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama RI.

Cangara, Hafied. 2014. *Komunikasi Politik, Konsep, Tiori, Dan* Strategi. Jakarta: Rajawali.

Data dari Kantor KPU Kota Payakumbuh, Hari Jum'at, Tanggal 26 Mai 2019 Jam 11:07 WIB

Data dari Kantor DPD PKS Kota Payakumbuh. Hari Jum'at. Tanggal 13 September 2019 Jam 08:30 WIB.

Data Kantor DPD PKS Kota Payakumbuh. Hari Kamis. Tanggal, 31 Desember 2019 Jam 13:30 WIB.

Divora, Tim dkk. 2014. *Profil Partai Politik Peserta Pemilu.* Jakarta: Erlangga.

Divora, Tim, dkk. 2014. *Profil Partai Politik Peserta Pemilu.* Jakarta: Erlangga.

Duvergen, Maurise. 2005. *Sosiologi Politik,* diterjemahkan Daniel Dhakidae. Jakarta: Raja Grafindo.

Furkon, Aay Muhamad. 2004. *Partai Keadilan Sejahtera Ideologi Dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Teraju.

Gatara, A. A. Sahid. 2008. *Ilmu Politik (Memahaami dan Menerapkan).* Bandung: Pustaka Setia.

Al-Hamdi, Ridho. 2013. *Partai Politik Islam Tiori Dan Praktik Di Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hanan , Abdul.2015. *Strategi Pemenangan Dakwa.* Jawa Barat: Mc Publishin.

Http://www.dakta.com/ news/ 3244/ mukernas-kokohkan-empat-misi-pks-2015-2010. Hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2019 Jam 08:35 WIB.

Iqbal, Muhammad. Nasution, Amin Husein. 2010. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer.* Jakarta: Kencana.

Kompas. 2004. *Partai- Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Kompas.

Kompas. 2004. *Partai- Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Kompas.

Moloeng Lexy J. 2000 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Narkubo, Cholid, dkk. 1997. *Metode Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara.

Nasution, S. 2001. *Metode Reasearch (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Saebani, Beni Ahmad. 2007. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Sarwono, Jonatan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sinaga, Rudi Salam. 2013. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakata: Graha Ilmu.

Sinaga, Rudi Salam. 2013. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakata: Graha.

Subakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Syafeei, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Politik.* Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Syafeei, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Politik.* Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Syarif, Mujar Ibnu. Zada, Khamami. 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.* Jakarta: Erlanga.

Thoha, Miftah. 2014. *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 *Tentang Partai Politik.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 *Tentang Partai Politik*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 *Tentang Partai Politik.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, *Tentang Pemilihan Umum*.

Usman, Husaini. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara.

www.kota. payakumbuh.kpu.go.id/ hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 jam 11:58 WIB.

Yugha E, Tim Divora. 2014. *Profil Partai Politik Peserta Pemilu,* Jakarta: Erlangga.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 253 /In.26.2/PP.02.3/05/2019

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syari'ah**
Program Studi **Hukum Tatanegara**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Mega Silfia** NIM. **1315011** tanggal 13 Mei 2019, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum**
NIP	:	19740525 199803 1 006
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk.I /IV/ a
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah	:	Hukum Agraria
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Adlan Sanur Th, M.Ag**
NIP	:	19760322 200501 1 003
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina/IV/a
Bidang Keahlian Pokok	:	Pemikiran Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Akhlak Tasawuf
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 15 Mei 2019

DEKAN,

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1 008

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.fsyar.iainbukittinggi.ac.id | email : fsyar@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. B- 974. 2 /In.26.2/TL.00.1/08/2019

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi menerangkan bahwa :

Nama	:	**Mega Silfia**
NIM	:	1315011
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Payakumbuh

Bahwa yang bersangkutan pada saat ini sedang menyelesaikan skripsi dengan :

Judul	:	**Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemilihan umum Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh**
Lokasi Penelitian	:	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik*Tj. Gadang, Kec Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh
Waktu Penelitian	:	06 Agustus 2019 s/d 06 November 2019
Kegunaan Penelitian	:	Untuk menyelesaikan Skripsi guna meraih gelar Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 7 Agustus 2019

Dekan,

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1 008

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN
Kampus I : Jalan Perintis Gerilya Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22870
Website : elib.iainbukittinggi.ac.id | Email : elib@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No.B. 2667 /In.26.8/HM.02.2/10/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan IAIN Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Mega Silfia
NIM	:	1315011
Fakultas / Jurusan	:	Fakultas Syariah/ Hukum Tata Negara
Judul	:	Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh

Dengan persyaratan batas toleransi bebas deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa sebanyak 30% dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan bersangkutan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 29 Oktober 2019
Kepala UPT Perpustakaan,

Novi Zulfikar, S.Sos, M.AP
NIP. 197711302009011006

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Sri Rejeki No. 5 Kel. Bulakan Balai Kandi Telp/Fax. (0752) - 95713 Kota Payakumbuh 26225

REKOMENDASI

Nomor. B.200/218/Kesbang-Pol/IX- 2019

TENTANG

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Kami Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan :

Surat Pengantar	:	IAIN Bukittinggi
Nomor	:	B.473.2/In.26.2/tl.00.1/08/2019
Tanggal	:	6 Agustus 2019
Perihal	:	Izin Penelitian

Dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian di Kota Payakumbuh yang dilakukan oleh :

N a m a	:	**MEGA SILVIA**
Tempat/Tgl. Lahir	:	Payakumbuh, 17 Januari 1996
Pekerjaan	:	Mahasiswa
A l a m a t	:	Kelurahan Tigo Koto diateh Kecamatan Payakumbuh Utara
Kartu Identitas	:	1376025701950001
Maksud/Tujuan	:	Untuk kelengkapan data dalam menyusun Skripsi dengan judul **"STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH "**
Lokasi	:	1. KPU Kota Payakumbuh 2. DPD PKS Kota Payakumbuh
Waktu	:	10 September s/d 10 November 2019
Anggota	:	-

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian/Survey/Pengambilan Data akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Dinas/ Kantor/Instansi/otoritas lokasi yang diteliti.
2. Tidak boleh menyimpang dari tujuan melaksanakan penelitian.
3. Memberitahukan/melaporkan diri pada Pemerintah, Dinas/Kantor setempat dan menjelaskan atas kedatangannya serta menunjukkan surat - surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat Istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
5. Mengirimkan laporan hasil karya ilmiahnya sebanyak 1 (satu) exemplar pada Walikota Payakumbuh cq Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh.
6. Apabila terjadi suatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan yang tersebut di atas maka surat keterangan / Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 10 September 2019

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PAYAKUMBUH
KASI KESBANG

YUSNIWARTI
NIP. 19621201 198503 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Payakumbuh di Payakumbuh (sebagai laporan)
2. Ketua KPU Kota Payakumbuh di Payakumbuh
3. Ketua DPD PKS Kota Payakumbuh di Payakumbuh
4. Sdr. Dekan IAIN Bukittinggi di Bukittinggi
5. Arsip

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PKS

SURAT KETERANGAN
Nomor : 01/DPDPKS/PYK/X/2019

Berdasarkan surat Rekomendasi dari Kesbangpol Kota Payakumbuh Nomor B.200/218/Kesbang-Pol/IX-2019 tentang izin melaksanakan penelitian. Bersama surat ini kami sampaikan kepada bapak /ibu bahwa nama yang tersebut di bawah ini:

Nama lengkap	: Mega Silvia
Tempat /tgl lahir	: Payakumbuh,17 Januari 1996
Alamat	: Kel.Tigo Koto Di ateh, kec Payakumbuh Utara
NIK	:1376025701950001
Waktu penelitian	: 10 September- 05 Oktober 2019
Judul Penelitian	: **Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Payakumbuh**

Telah selesai melakukan penelitian di kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Payakumbuh.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Payakumnbuh
Pada tanggal : 05 Oktober 2019

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera
Kota payakumbuh

(Hamdi Agus, S.T)
Ketua

DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA PAYAKUMBUH
Jl. Jendral Sudirman No. 46 Kel. Tigo Koto DiBalai Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh – Sumatera Barat
www.pks.or.id email : dpdpks.pyk@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN WAWANCARA

Nama	:	Hamdi Agus, ST
Usia	:	37 Tahun
Jabatan/Status	:	Ketua DPD PKS Kota Payakumbuh
Alamat	:	Jln. Palembang No. 253 Kel. Parik Rantang
Pendidikan Terakhir	:	S1 Teknik Universitas Andalas
Waktu Wawancara	:	Selasa, 01 oktober 2019
Tempat Wawancara	:	Kantor DPRD Kota Payakumbuh.

Telah melakukan wawancara atau telah memberikan informasi kepada saudara **Mega Silfia NIM. 1315.011**. Mahasiswa Institut Agama Islam Negara (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tatanegara (HTN). Dengan judul Skripsi **"STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH".**

Payakumbuh, 01 oktober 2019

Responden

Hamdi Agus

Pewawancara

Mega Silfia

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN WAWANCARA

Nama	: Adek Fauzan, SH
Usia	: 35 Tahun
Jabatan/Status	: Sekretaris PKS KOTA Payakumbuh
Alamat	: Jln. Sudirman Kec. Payakumbuh Utara, Pay
Pendidikan Terakhir	: Sarjana
Waktu Wawancara	: Senin, 23 September 2019
Tempat Wawancara	: Kantor DPD PKS KOTA Payakumbuh

Telah melakukan wawancara atau telah memberikan informasi kepada saudara **Mega Silfia NIM. 1315.011**. Mahasiswa Institut Agama Islam Negara (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tatanegara (HTN). Dengan judul Skripsi **"STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH".**

Payakumbuh, 23 September 2019

Responden

Adek Fauzan, SH

Pewawancara

Mega Silfia

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN WAWANCARA

Nama	:	KHAIRUNNAS
Usia	:	32 th
Jabatan/Status	:	Ka. bid. Kepemudaan
Alamat	:	Jln. Soekarno Hatta No. 217 Payakumbu
Pendidikan Terakhir	:	D3
Waktu Wawancara	:	Rabu, 11 September 2019
Tempat Wawancara	:	Kantor DPD PKS Kota Payakumbuh

Telah melakukan wawancara atau telah memberikan informasi kepada saudara **Mega Silfia NIM. 1315.011**. Mahasiswa Institut Agama Islam Negara (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tatanegara (HTN). Dengan judul Skripsi **"STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH".**

Payakumbuh, 11 September 2019

Responden

Khairunnas

Pewawancara

Mega Silfia

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN WAWANCARA

Nama	: Sugiarno
Usia	: 38 tahun
Jabatan/Status	: Kabid. kesra PKS
Alamat	: Payakumbuh
Pendidikan Terakhir	: SMA
Waktu Wawancara	: Kamis, 19 September 2019
Tempat Wawancara	: Kantor DPD PKS Kota Payakumbuh

Telah melakukan wawancara atau telah memberikan informasi kepada saudara **Mega Silfia NIM. 1315.011**. Mahasiswa Institut Agama Islam Negara (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tatanegara (HTN). Dengan judul Skripsi **"STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH".**

Payakumbuh, 19 September 2019

Responden

Sugiarno

Pewawancara

Mega Silfia

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN WAWANCARA

Nama	: TRI VENINDRA, SE
Usia	: 47.
Jabatan/Status	: Ketua. BP3. DPD PKS Kota Payakumbuh,
Alamat	: Kel. Parit Rantang.
Pendidikan Terakhir	: S1
Waktu Wawancara	: Senin, 16 September 2019
Tempat Wawancara	: jln. Imam Bonjol No. 07, Kel. Payolansek

Telah melakukan wawancara atau telah memberikan informasi kepada saudara **Mega Silfia NIM. 1315.011**. Mahasiswa Institut Agama Islam Negara (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tatanegara (HTN). Dengan judul Skripsi "**STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH".**

Payakumbuh, 16 September 2019

Responden

TRI VENINDRA, SE

Pewawancara

Mega Silfia

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN WAWANCARA

Nama	: Yudhi Andrianto, S.Pd
Usia	: 34 Th
Jabatan/Status	: Humas
Alamat	: Jl. Syeh Ibrahim Harun Tiakar, Payakumbuh Ti
Pendidikan Terakhir	: S1
Waktu Wawancara	: Sabtu, 28 September 2019
Tempat Wawancara	: DPD PKS Payakumbuh

Telah melakukan wawancara atau telah memberikan informasi kepada saudara **Mega Silfia NIM. 1315.011**. Mahasiswa Institut Agama Islam Negara (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tatanegara (HTN). Dengan judul Skripsi **"STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH".**

Payakumbuh, 28 September 2019

Responden

Yudhi Andrianto, S.Pd

Pewawancara

Mega Silfia

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN WAWANCARA

Nama	: H. Wardi Munir, SH
Usia	: 50 Tahun
Jabatan/Status	: Mantan Ketua DPD PKS Kota Payakumbuh
Alamat	: Kel. Tiga Kaki di Baruah, Kec. Payakumbuh Utara
Pendidikan Terakhir	: S1 HTN STIH Putri Maharaga
Waktu Wawancara	: Sabtu, 05 Oktober 2019
Tempat Wawancara	: Di Rumah

Telah melakukan wawancara atau telah memberikan informasi kepada saudara **Mega Silfia NIM. 1315.011**. Mahasiswa Institut Agama Islam Negara (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tatanegara (HTN). Dengan judul Skripsi **"STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH".**

Payakumbuh, 05 Oktober 2019

Responden

H. Wardi Munir, SH

Pewawancara

Mega Silfia

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN WAWANCARA

Nama	: Yohandriwati Syamsu, S. Sos
Usia	: 48 Tahun
Jabatan/Status	: Ketua Bidang Perempuan DPD PKS Kota Payakumbuh
Alamat	: Kota Payakumbuh
Pendidikan Terakhir	: S2 Universitas Padjadjaran
Waktu Wawancara	: Kamis, 03 Oktober 2019
Tempat Wawancara	: SD IT Mutiara Hati Payakumbuh

Telah melakukan wawancara atau telah memberikan informasi kepada saudara **Mega Silfia NIM. 1315.011**. Mahasiswa Institut Agama Islam Negara (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tatanegara (HTN). Dengan judul Skripsi **"STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH".**

Payakumbuh, 03 Oktober 2019

Responden

Yohandriwati Syamsu. S. Sos

Pewawancara

Mega Silfia

LEMBAR WAWANCARA

Nama : **Hamdi Agus, ST**
Usia : **37 Tahun**
Jabatan/Status : **Ketua DPD PKS Kota Payakumbuh**
Alamat : **Jln. Palembang, No. 253 Kel. Parik Rantang, Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh**
Pendidikan Terakhir : **S1 Teknik Universitas Andalas**
Waktu Wawancara : **Selasa, 01 Oktober 2019**
Tempat Wawancara : **Kantor DPRD Kota Payakumbuh**

1. Apasaja bentuk-bentuk strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019?

Jawab:

a. Pencalekan

b. Kampanye

2. Apa alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan strategi politik ini pada tahun 2019?

Jawab:

Untuk menambah suara.

3. Sejak kapan strategi politik ini diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh?

Jawab:

Semenjak tahapan pemilihan umum ini di mulai.

4. Dimana saja model strategi politik ini diterapkan?

Jawab:

Diterapkan hampir seluruh masyarakat yang ada di Indonesia

5. Bagaimana perbedaan strategi politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan partai politik lainnya?

Jawab:

Jual konsep dan isu yang jelas partai lain belum tentu memilikinya.

6. Menga Parta Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan strategi ini?

Jawab :

Karena strategi ini menurut kita dapat mendongrak suara Partai Keadilan Seahtera (PKS)

7. Apa keunggulan dan kelemahan strategi politik ini?

Jawab :

a. Keunggulannya yaitu: *Pertama,* calon Legislatif di bekali atau pemahaman ide untuk di berikan ke masyarakt. *Kedua*, menyampaikan program partai.
b. Kelemahannya, yaitu: janji politiksusah untuk di wujudkan.

8. Berapa kursi yang di peroleh Partai Keadilan Seahtera (PKS) Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019?

Jawab :

5 kursi

9. Apasaja hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menerapkan strategi politik pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh?

Jawab :

a. Partai tertutup partai eksekutif.
b. Butuh finansial.

10. Kenapa terjadi hambatan-hambatan Partai Keadilan Seahtera (PKS) dalam menerapkan strategi politik pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh?

Jawab :

Karena masyarakat kurang kesadaran bahwa atas partai PKS adalah partai dakwa.

Payakumbuh, 01 oktober 2019

Pewawancara

Mega Silfia

Responden

Hamdi Agus, ST

LEMBAR WAWANCARA

Nama : Adek Fauzan, SH
Usia : 35 Tahun
Jabatan/Status : Sekretaris PKS Kota Payakumbuh
Alamat : Jln. Sudirman Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh
Pendidikan Terakhir : Serjana
Waktu Wawancara : Senin, 05 Agustus 2019
Tempat Wawancara : Kantor DPD PKS Kota Payakumbuh

1. Apasaja bentuk-bentuk strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019?

Jawab:

a. Memilih calon legislatif potensial dari berbagai sigmen masyarakat.
b. Memberikan pendidikan politik dengan cara adanya program PKS (Undang-Undang perlindungan Ulama, Undang-Undang pajak motor gratis dan SIM seumur hidup).
c. Adanya metode kampanye flash Mob (aksi bersama turun kejalan).
d. Direct selling.

2. Apa alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan strategi politik ini pada tahun 2019?

Jawab:

a. Masyarakat perlu di berikan pendidikan politik sehingga dapat memilih rasional.
b. Perlu adanya hubungan emosional terjalin dengan para pemilih/ konstituen.

3. Sejak kapan strategi politik ini diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh?

Jawab:

a. Strategi flash mob sejak tahun 2019.
b. Strategi direct selling sejak tahun 2004.

4. Dimana saja model strategi politik ini diterapkan?

Jawab:

Di seluruh tempat

5. Bagaimana perbedaan strategi politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan partai politik lainnya?

Jawab:

a. Adanya kegiatan dalam bentuk lain: flash mob, dll.
b. Adanya gagasan atau ide untk membuat undang-undang yang di butuhkan oleh masyarakat.

6. Mengapa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan strategi politik ini?

Jawab:

Lebih efektif dan efisien.

7. Apa keunggulan dan kelemahan strategi politik ini?

Jawab:

Keunggulannya

Lebih efektif dan efisien.

Kelemahannya

Butuh banyak SDM dan waktu untuk melakukan kampanye tersebut.

8. Berapa kursi yang di peroleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019?

Jawab:

5 kursi

9. Apasaja hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menerapkan strategi politik pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh?

Jawab:

a. Adanya perbedaan pemahaman aturan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partai.

b. Sember daya manusia yang masih terbatas.

10. Kenapa terjadi hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menerapkan strategi politik pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh?

Jawab:

Keuangan yang kurang memadai.

Payakumbuh, 23 September 2019

Pewawancara	Responden
Mega Silfia	**Adek Fauzan, SH**

LEMBAR WAWANCARA

Nama **: Khairunnas**

Usia **: 32 Tahun**

Jabatan/Status **: Ketua Bidang Kepemudaan DPD PKS Kota Payakumbuh**

Alamat **: Jln. Soekarno Hatta No. 217 Payakumbuh**

Pendidikan Terakhir **: D3 Politeknik**

Waktu Wawancara **: Rabu, 11 September 2019**

Tempat Wawancara **: Kantor DPD PKS Kota Payakumbuh**

1) Apasaja bentuk-bentuk strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019?

Jawab:

a. Direct selling ini ciri khas turun ke masyarakat atau bersosialisasi.
b. Flash Mob (timbal balik) karena ini suatu hal yang unik dan tidak dilakukan oleh partai-partai politik lain.

6) Apa alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan strategi politik ini pada tahun 2019?

Jawab:

a. Karena bisa langsung menyapa masyarakat atau bersosialisasi.
b. Pusat perhatian.
c. Ekonomis tanpa banyak biaya.

7) Sejak kapan strategi politik ini diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh?

Jawab:

Sejak partai ini berdiri dan telah menjadi ciri khas.

8) Dimana saja model strategi politik ini diterapkan?

Jawab:

Strategi partai politik ini di kota payakumbuh dilakukan di setiap kelurahan dan pusat keramaian.

9) Bagaimana perbedaan strategi politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan partai politik lainnya?

Jawab:

Strategi partai politik PKS langsung turun kemasyarakat dan tidak hanya hadir dalam waktu kampanye saja tapi partai lain belum tentu.

10) Mengapa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan strategi politik ini?

Jawab:

Supaya bisa dekat dengan masyarakat, meyakinkan ke masyarakat dan calon-calon Legislatif dan langsung datang ke masyarakakat.

11) Apa keunggulan dan kelemahan strategi politik ini?

Jawab:

Keunggulannya

a. Tatap muka dengan masyarakat.
b. Lebih mengenal masyarakat.

Kelemahannya

Banyak berkorban waktu.

12) Berapa kursi yang di peroleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019?

Jawab:

Kursi yang di peroleh PKS pada tahun 2019 yaitu 5 kursi

13) Apasaja hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menerapkan strategi politik pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh?

Jawab:

a. Latar belakang PKS yang beragam.
b. Mengatur waktu strategi direct selling dan flash Mop.

14) Kenapa terjadi hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menerapkan strategi politik pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh?

Jawab:

Karena kader PKS punya latar belakang masing-masing atau kesibukan masing-masing jadi susah untuk meluangkan waktu.

Payakumbuh, 12 September 2019

Pewawancara

Mega Silfia

Responden

Khairunnas

LEMBAR WAWANCARA

Nama	**: Sugiarno**
Usia	**: 39 Tahun**
Jabatan/Status	**: Katua bidang Kesra PKS**
Alamat	**: Jln. Sudirman Payakumbuh**
Pendidikan Terakhir	**: SMA**
Waktu Wawancara	**:Kamis, 19 September 2019**
Tempat Wawancara	**: Kantor DPD PKS Kota Payakumbuh**

1. Apasaja bentuk-bentuk strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019?

Jawab:

a. Berbuat untuk masyarakat

b. Melakukan kampanye

2. Apa alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan strategi politik ini pada tahun 2019?

Jawab:

a. Memenangkan pemilihan umum

b. Peraturan daerahnya ada upaya hukumnya

3. Sejak kapan strategi politik ini diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh?

Jawab:

Sejak berdirinya tahun 1999 yaitu bernama PK dan pada tahun 2002 berubah nama menjadi PKS.

4. Dimana saja model strategi politik ini diterapkan?

Jawab:

Diseluruh tempat terstuktur dari pusat

5. Bagaimana perbedaan strategi politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan partai politik lainnya?

Jawab:

Perbedaan tidak jauh beda dengan partai lain, tapi partai PKS spasifiknya di bidang dakwa dan berazaskan islam atau disebut jugga denganpartai dakwa.

6. Mengapa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan strategi politik ini?

Jawab:

Karena masyarakat tidak semua butuh sentuhan politik atau janji-janji kampanye.

7. Apa keunggulan dan kelemahan strategi politik ini?

Jawab:

Keunggulannya

a. PKS tidak menggunakan mani politik
b. PKS tidak hanya hadir dalam pemilihan umum saja, tapi PKS hadir setiap waktu walaupun tidak dalam waktu kampanye.

Contoh: setiap ada bencana alam (banjir, longsor, gemba bumi, dll) di Indonesia PKS berpartisipasi disana.

c. Partai politik PKS setiap kader-kadernya ada nama infak pemilihan umum atau sembangan pemilihan umum.

Kelemahannya

Keuanggan yang sangat minim

8. Berapa kursi yang di peroleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019?

Jawab:

5 kursi

9. Apasaja hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menerapkan strategi politik pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh?

Jawab:

Tuntutan finansial tidak dapat di ungkiri lagi.

10. Kenapa terjadi hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menerapkan strategi politik pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh?

Jawab:

a. Persaingan yang sangat ketet
b. Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa partai PKS adalah partai dakwa atau partai islam.

Payakumbuh, 19 September 2019

Pewawancara

Mega Silfia

Responden

Sugiarno

LEMBAR WAWANCARA

Nama	**: Tri Venindra, SE.**
Usia	**: 47 Tahun**
Jabatan/Status	**: Ketua BP3 DPD PKS Kota Payakumbuh**
Alamat	**: Parik Rantang, No. 253**
Pendidikan Terakhir	**: S1**
Waktu Wawancara	**: Senin, 16 September 2019**
Tempat Wawancara	**: Jln. Imam Bonjol No. 07, Kel. Payolansek**

1. Apasaja bentuk-bentuk strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019?

Jawab:

a. Pelayanan lebih untuk rakyat.
b. Bantuan untuk para bencana yang terjadi di Indonesia.

2. Apa alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan strategi politik ini pada tahun 2019?

Jawab:

Karena kita butuh sura rakyat karna itu kita harus merakyat.

3. Sejak kapan strategi politik ini diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh?

Jawab:

Semenjak berdirinya PKS

4. Dimana saja model strategi politik ini diterapkan?

Jawab:

Diseluruh Indonesia

5. Mengapa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan strategi politik ini?

Jawab:

Untuk merebut suara dan perintah Allah atau agama untuk berdakwa.

6. Apa keunggulan dan kelemahan strategi politik ini?

Jawab:

Keunggulannya, yaitu: kerhikmat dalam masyarakat dan kelemahannya tidak ada.

7. Berapa kursi yang di peroleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019?

Jawab:

Tahun 2019 adalah 5 kursi.

8. Apasaja hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menerapkan strategi politik pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh?

Jawab:

Keterbatasan kader dan keterbatasan dana karena PKS tidak menjadikan uang sebagai strategi partainya.

9. Kenapa terjadi hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menerapkan strategi politik pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh?

Jawab:

Tidak semua masyarakat memahami tentang partai politik PKS dan tidak boleh menggunakan uang untuk kampanye.

Payakumbuh, 16 September 2019

Pewawancara	Responden
Mega Silfia	**Tri Venindra, SE.**

LEMBAR WAWANCARA

Nama **: Yudhi Andrianto, S. Pd**

Usia **: 34 Tahun**

Jabatan/Status **: Humas PKS Kota Payakumbuh**

Alamat **: Kota Payakumbuah**

Pendidikan Terakhir **: SI**

Waktu Wawancara **: Sabtu, 28 September 2019**

Tempat Wawancara **: Kantor DPD PKS Kota Payakumbuh**

1. Apasaja bentuk-bentuk strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019?

Jawab:

e. Pemetaan partai politik

f. Pembentukan kader yang di tokohkan menjadi anggota Legislatif.

g. Komunikasi dan pendekatan tokoh-tokoh masyarakat.

2. Apa alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan strategi politik ini pada tahun 2019?

Jawab:

Untuk menyebarkan dakwa-dakwa ke masyarakat atau nilai-nilai kebaikan melalui jabatan Legislatif (MPR, DPD, dan DPRD).

3. Sejak kapan strategi politik ini diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh?

Jawab:

Sejak berdirinya partai ini yang berawal dari partai politik PK pada tahun 1998

4. Dimana saja model strategi politik ini diterapkan?

Jawab:

Strategi politik ini dilakukan oleh partai PKS di Indonesia tapi hanya teknis penyampaiannya yang berbeda. “cara pendekatan bukan dengan mani politic”.

5. Bagaimana perbedaan strategi politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan partai politik lainnya?

Jawab:

PKS partai politik dakwa dan cuma azasnya saja yang membedakan dengan partai politik lain.

6. Mengapa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan strategi politik ini?

Jawab:

Karna bagi partai politik PKS dakwa itu solusi sebuah partai.

7. Apa keunggulan dan kelemahan strategi politik ini?

Jawab:

Keunggulannya

Kita punya pedoman dan nilai-nilai rujukan.

Kelemahannya

Tidak ada kelemahan.

8. Berapa kursi yang di peroleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019?

Jawab:

5 kursi

9. Apasaja hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menerapkan strategi politik pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh?

Jawab:

Belum semua masyarakat sadar bahwa partai politik PKS adalah partai dakwa.

10. Kenapa terjadi hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menerapkan strategi politik pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh?

Jawab:

Kerena beda pemikiran disebabkan banyak yang belum memahami

konteks dakwa.

Payakumbuh, 20 September 2019

Pewawancara	Responden
Mega Silfia	**Yudhi Andrianto, S. Pd**

LEMBAR WAWANCARA

Nama : H. Wardi Munir, SH.
Usia : 50 Tahun
Jabatan/Status : Mantan Ketua DPD PKS Kota Payakumbuh
Alamat : Kel. Tigo Koto di Baruah, Kec. Payakumbuh Utara
Pendidikan Terakhir : S1 HTN STIH Putri Maharaja

1. Apasaja bentuk-bentuk strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019?

Jawab:

e. Konsolidasi struktural secara berkala mempercepat rekrutmen tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat lainnya sebagai CAD (Calon Anggota Dewan).
f. Membangun *opini* publik tentang Partai Keadilan Sejahtera sebagai pro rakyat kecil melalui kegiatan *Flash Mob* secara massif di jalan-jalan raya.
g. Mengangkat tema kampanye yang rasional, dan aplikatif,
h. Pemberdayaan CAD (Calon Anggota Dewan) dari kalangan milanial dalam meruap potensi suara pemilih pemula.

2. Apa alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan strategi politik ini pada tahun 2019?

Jawab:

Berdasarkan hasil servey bahwa moyoritas pemilih di Kota Payakumbuh adalah pemilih emosional. Maka calon Legislatif yang berlatar belakang tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda lebih muda medulang suara. Hal ini tidak mengabaikan nilai-nilai primordial yang sudah lumrah ditengah-tengah masyarakat

3. Sejak kapan strategi politik ini diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Payakumbuh?

Jawab:

Semenjak partai ini didirikan.

4. Dimana saja model strategi politik ini diterapkan?

Jawab:

Strategi seperti ini rata-rata di terapkan di semua daerah. Apa keunggulan dan kelemahan strategi politik ini?

Jawab:

Strategi direct selling (DS) dengan bersilaturrahmi kerumah-rumah tetangga dan masyarakat dapat di jadikan media untuk menyampaikan visi misi.

5. Berapa kursi yang di peroleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019?

Jawab:

5 kursi di DPRD Kota Payakumbuh

6. Apasaja hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menerapkan strategi politik pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh?

Jawab:

a. Hambatan-hambatan Internal, yaitu: *Pertama*, jumlah kader yang terbatas. *Kedua*, kemampuan finansial partai yang minim. *Ketiga,* kekhawatiran terjebak kepada janji politik. *Keempat,* dukungan keluarga. *Kelima*, minim pengalaman bagi calon Legislatif pemula.
b. Hambatan-hambatan Eksternal, yaitu: *Pertama*, Persepsi masyarakat yang sudah terpolarisasi dengan budaya politik pragmatis. *Kedua*, budaya money politic masih mewabah di tengah-tengah masyarakat. *Ketiga,* ancaman "serangan fajar" yang sering merubah pilihan masyarakat menengah kebawah. *Keempat,* informasi tentang regulasi sistem pemilihan umum tidak terdistribusi secara merata ke masyarakat. *Kelima*, kecurangan dalam penghitungan suara.

7. Kenapa terjadi hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menerapkan strategi politik pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh?

Jawab:

Karena aturan sistem pemilihan umum kita tidak berlaku permanen, sehingga regulasi yang di terbitkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan pemerintah sering tumbang tindih.

Payakumbuh, 06 Oktober 2019

Pewawancara	Responden
Mega Silfia	**H. Wardi Munir, SH.**

LEMBAR WAWANCARA

Nama : **Yohandriwati Syamsu, S.Sos**
Usia : **48 Tahun**
Jabatan/Status : **Ketua bidang Perempuan DPD PKS Kota Payakumbuh**
Alamat : **Kota Payakumbuh**
Pendidikan Terakhir : **S2 Universitas Padjadjaran**
Waktu Wawancara : **Kamis, 03 Oktober 2019**
Tempat Wawancara : **SD IT Mutiara Hati Payakumbuh**

1. Apasaja bentuk-bentuk strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019?

Jawab:

a. Dekat dengan masyarakat dan Allah.

b. Dengarkan suara masyarakat dan kita dapat bantu masyarakat.

c. Flash Mob atau aksi bersama turun ke masyarakat.

2. Apa alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan strategi politik ini pada tahun 2019?

Jawab:

Alasannya untuk menyebarkan kebaikan atau berdakwa.

3. Dimana saja model strategi politik ini diterapkan?

Jawab:

Dari pusat sampai kedaerah prinsip esensin dasarnya sama tapi yang membedakan kearifan lokalnya saja.

4. Bagaimana perbedaan strategi politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan partai politik lainnya?

Jawab:

Tidak mengerahui partai politik lain yang hanya di ketahui bahwa partai PKS adalah paratai dakwa.

5. Apa keunggulan dan kelemahan strategi politik ini?

Jawab:

a. Keunggulannya, yaitu: PKS tidak menggunakan mani politik, dan PKS menyebarkan kebaikan karena partai dakwa.
b. Kelemahannya tidak tahu.

6. Berapa kursi yang di peroleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh dalam pemilihan umum Legislatif 2019?

Jawab:

5 kursi

7. Apasaja hambatan-hambatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menerapkan strategi politik pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Payakumbuh?

Jawab:

Tidak ada hambatan-hambatan.

Payakumbuh, 04 oktober 2019

Pewawancara	Responden
Mega Silfia	**Yohandriwati Syamsu, S.Sos**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Mega Silfia
Nim	: 1315.011
Program studi	: Hukum Tata Negara (HTN)
Tempat/Tanggal Lahir	: Payakumbuh, 17 Januari 1996
Agama	: Islam
Anak dari	: Jasri. N (Ayah)
	Ismawati (Ibu)
Alamat	: Ling. Padang Kaduduk, Kec. Pyk Utara, Kota Payakumbuh
Handphone	: 085364562646

Riwayat Pendidikan:

1. TK Al-Mu'sinin Batusangkar (2002- 2003)
2. SD Negeri 20 Batusangkar (2003- 2008)
3. SD Negeri 11 Kota Payakumbuh (2008- 2009)
4. MTs N 2 Kota Payakumbuh (2009- 2012)
5. MAN 1 Parambahan (2012- 2015)
6. IAIN Bukittinggi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) (2015-2019)

Pengalaman Organisasi:

1. Anggota Bidang Internal Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (HMJ HTN) di IAIN Bukittinggi, Tahun 2016-2017 M.
2. Ketua Bidang Internal Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (HMJ HTN) di IAIN Bukittinggi, Tahun 2017-2018 M.
3. Anggota Persatuan Mahasiswa 50 Kota dan Payakumbuh (PERMALIPA).
4. Kader UKMD IAIN Bukittinggi.
5. Anggota Bidang Litbang Kepengurusan Pramuka GUDEP 13.265-13.266 Sjech M.Djamil Djambek-Siti Manggopoh IAIN Bukittinggi.
6. Ketua Bidang Litbang Kepengurusan Pramuka GUDEP 13.265-13.266 Sjech M.Djamil Djambek-Siti Manggopoh IAIN Bukittinggi.
7. Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pimpinan Komisariat Imam Bonjol (PK IB).
8. Sekretaris Bidang Sosial Pengurus Cabang IMM Bukittinggi